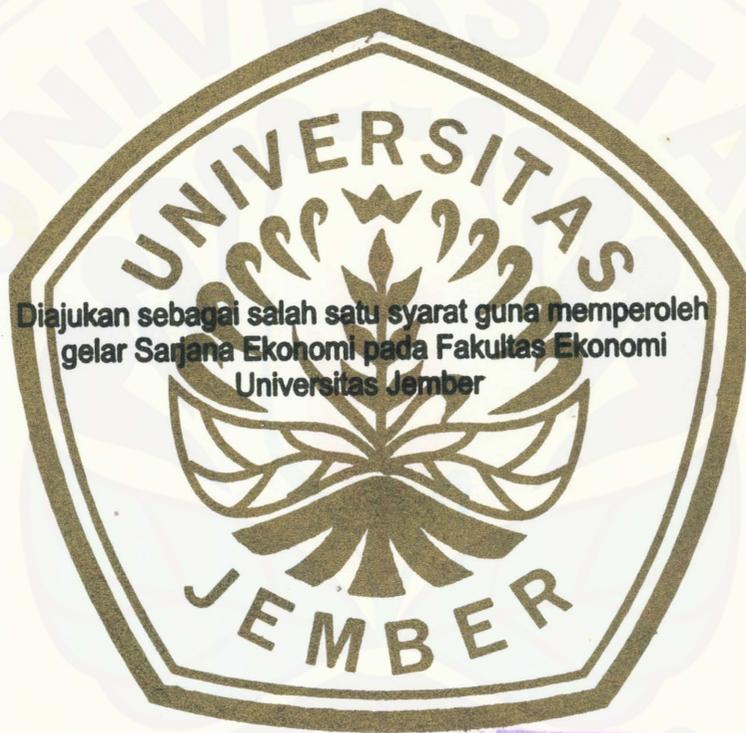


**ANALISIS PROYEK KREDIT MIKRO TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN
PENGUSAHA MIKRO DI WILAYAH eks KARISIDENAN BESUKI
(studi Kasus Di Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Jember)**

SKRIPSI

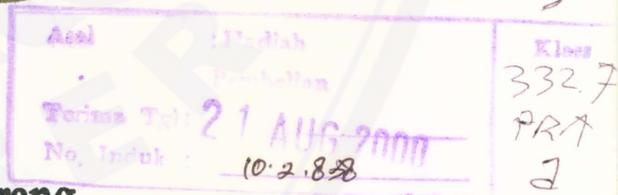


Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh :

Gerrit Laurens Prang

NIM : 960810201411E



**PROGRAM S1 EXTENSION
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER
2000**

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PROYEK KREDIT MIKRO TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN PENGUSAHA MIKRO
DI WILAYAH eks KARISIDENAN BESUKI
(studi Kasus Di Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Jember)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : Gerrit Laurens Prang

N.I.M. : 960810201411 E

J u r u s a n : Manajemen

telah dipertahankan didepan Panitia Penguji pada tanggal :

3 Juli 2000

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh gelar **S a r j a n a** dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas
Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,


Drs. SUWARDI

NIP: 131 129 286

Sekretaris,


Dra. ELOK SRI UTAMI, MSi

NIP: 131 877 449

Anggota,


Drs. H. NOOR ALIE, SU

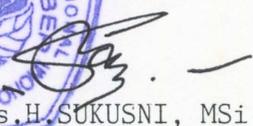
NIP: 130 345 928

Mengetahui / Menyetujui

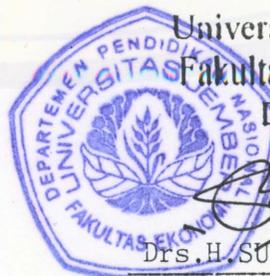
Universitas Jember

Fakultas Ekonomi

Dekan,


Drs. H. SUKUSNI, MSi

NIP: 130 350 764



TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Proyek Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Pendapatan Pengusaha Mikro Di Wilayah ex Karesidenan Besuki (Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Jember)

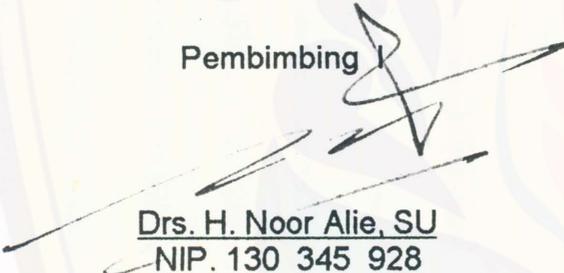
Nama Mahasiswa : Gerrit Laurens Prang

NIM : 96.1411E

Jurusan : Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

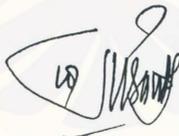
Pembimbing I


Drs. H. Noor Alie, SU
NIP. 130 345 928

Pembimbing II


Dra. Susanti Prasetyaningtias, M.Si
NIP. 132 006 243

Ketua Jurusan


Dra. Susanti Prasetyaningtias, M.Si
NIP. 132 006 243

Tanggal persetujuan : 21 Juni 2000

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Istriku tercinta ***Lientje Manoppo***, yang dengan kasih sayang dan pengorbanan dalam segala hal serta membantu dalam doa disetiap kesempatan, telah memberikan dorongan dalam kuliah dan penulisan skripsi ini;
- ❖ Anakku tercinta :
 - ***Sonia Lefina Natalia***
 - ***Pingkan Cinthia Elizabeth***Yang selalu memberikan dorongan dan doa dalam menjalani perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini
- ❖ Almamater yang selalu kujunjung tinggi

Motto :

Dimana ada Kebenaran, disitu akan tumbuh Damai Sejahtera, dan akibat Kebenaran ialah Ketenangan dan Ketentraman untuk selamanya.
(Yesaya, 32:17)

..... baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan
(Amsal 1 : 5)

..... takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang Bodoh menghina hikmat dan didikan (Amsal 1 : 7)

Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun
(Yakobus 1 : 4)

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui perbedaan tingkat pendapatan antara sebelum dan setelah para pengusaha mikro diberikan kredit (2) adakah pengaruh besarnya kredit yang diberikan terhadap tingkat pendapatan para pengusaha mikro (3) mengetahui perkembangan, jumlah nasabah, dan jumlah kredit yang diberikan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Jember yang meliputi Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi.

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dengan mempergunakan daftar pertanyaan terhadap 100 sampel nasabah dari populasi nasabah sekitar 16.000 penerima kredit mikro. Teknik pengukuran melalui uji statistik perbedaan dua sampel means (rata-rata) dengan derajat kepercayaan (confident level 95%), uji korelasi dengan metode product moment dan menghitung trend perkembangan dengan metode trend linier. Besar-kecilnya kredit yang diberikan kepada para pengusaha mikro tidak secara otomatis berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan koefisien korelasi sebesar 0,42304, berarti ada 42,30% pengaruh besarnya kredit mikro terhadap pendapatan nasabah, sedangkan 57,70% pendapat nasabah tersebut dipengaruhi oleh variabel di luar kredit mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kredit mikro dapat meningkatkan pendapatan para pengusaha mikro disamping pengembalian kreditnya sendiri cukup lancar. Hal ini terbukti setelah diadakan uji hipotesis untuk perbedaan dua sampel means adalah 6,47(di sebelah kanan titik kritis) sedang daerah penerimaan hipotesis adalah pada jarak sampai dengan 1,64 (titik kritis). Uji hipotesis dilakukan dengan derajat kepercayaan (confident level)=95% untuk sampel >30

Dari hasil penelitian dapat diketahui pula bahwa jumlah nasabah mikro dan jumlah portofolio kredit meningkat yaitu jumlah nasabah mencapai 16.417 orang dengan portofolio kredit mencapai Rp9.861.000.000,00 dan perkembangannya dapat diprediksikan dengan tingkat perkembangan kepada kecenderungan membentuk trend linier dengan persamaan $Y=7.265+2.509X$ untuk nasabah dan $Y=5.580+1.439X$ untuk portofolio kredit.

Dari hasil analisis secara kualitatif dapat disimpulkan bahwa kredit mikro sangat bermanfaat bagi pengusaha kecil tetapi belum sepenuhnya menjangkau para pengusaha mikro terutama yang dikategorikan sebagai pengusaha miskin dan mendekati miskin. Berdasarkan fakta ini penulis menyarankan untuk memperpanjang masa proyek dari yang direncanakan.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih yang telah memberikan bimbingan serta hikmat dan kebijaksanaan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul "Analisis Proyek Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Pendapatan Pengusaha Mikro di Wilayah ex Karesidenan Besuki (Studi Kasus di Wilayah Kerja Bank Indonesia Jember), guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Jember.

Selanjutnya penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini. Disamping itu penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Drs. H. Sukusni, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi;
2. Bp. Drs. H. Noor Alie, SU, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk dan pengarahan yang baik dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Dra. Susanti Prasetyaningtyas, M.Si, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi program Ekstension, juga selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu mengarahkan serta memberikan dorongan selama penyusunan sampai akhir penulisan skripsi ini;
4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember Program Ekstension;
5. Keluargaku tercinta (Isteriku Lientje Manoppo, Anakku: Sonia Lefina Natalia, dan Pingkan Cinthia Elizabeth) yang telah memberikan dukungan dengan kasih sayang dalam segala hal;
6. Bapak Bambang Murdadi, SE,MM Staf Bank Indonesia yang telah memberikan bantuan moril dalam penyusunan skripsi ini;

7. Teman-temanku (Meiko, Eko, Fahrizi, Lina, Wiwien,) yang saya hormati;
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan kebaikan semua pihak mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa isi beserta penyajiannya jauh dari sempurna oleh karena itu dengan penuh rasa hormat dan senang hati, penulis senantiasa menerima kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan pada waktu yang akan datang.

Jember, Juni 2000

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	I
Halaman Judul	II
Halaman Persetujuan	III
Halaman Persembahan	IV
Halaman Motto	V
<i>Abstraksi</i>	VI
Kata Pengantar	VII
Daftar Isi	IX
Daftar Tabel	XI
Daftar Gambar	XII
Daftar Lampiran	XIII
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Permasalahan	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan hasil penelitian sebelumnya	4
2.1.1 Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hariati	4
2.1.2 Penelitian yang dilakukan oleh Retno Poernomo	4
2.2 Landasan Teori.....	5
2.2.1 Pengertian Bank	5
2.2.2 Fungsi dan Sifat Usaha Bank Umum	6
2.2.3 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	7
2.2.4 Pelayanan perkreditan bagi pengusaha kecil	9
2.2.5 Proyek Kredit Mikro (PKM)	10
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	25
3.2 Populasi dan Sampel	25
3.3 Prosedur Pengumpulan Data	26
3.4 Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya	27
3.5 Metode Analisis Data	27
3.5.1 Analisis secara kuantitatif	27
3.5.2 Analisis secara kualitatif	29
3.6. Hipotesis	30
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah	31

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian	33
4.2 Analisis Data	37
4.2.1 Korelasi besarnya kredit dengan pendapatan yang diperoleh pengusaha mikro	37
4.2.2 Menghitung perbedaan tingkat pendapatan	37
4.2.3 Perkembangan jumlah nasabah, dan jumlah kredit yang disalurkan	40
4.3 Pembahasan	45
4.3.1 Omzet penjualan	46
4.3.2 Tingkat suku bunga	47
V. Simpulan Dan Saran	
5.1 Simpulan	49
5.2 Saran	50

Lampiran
Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

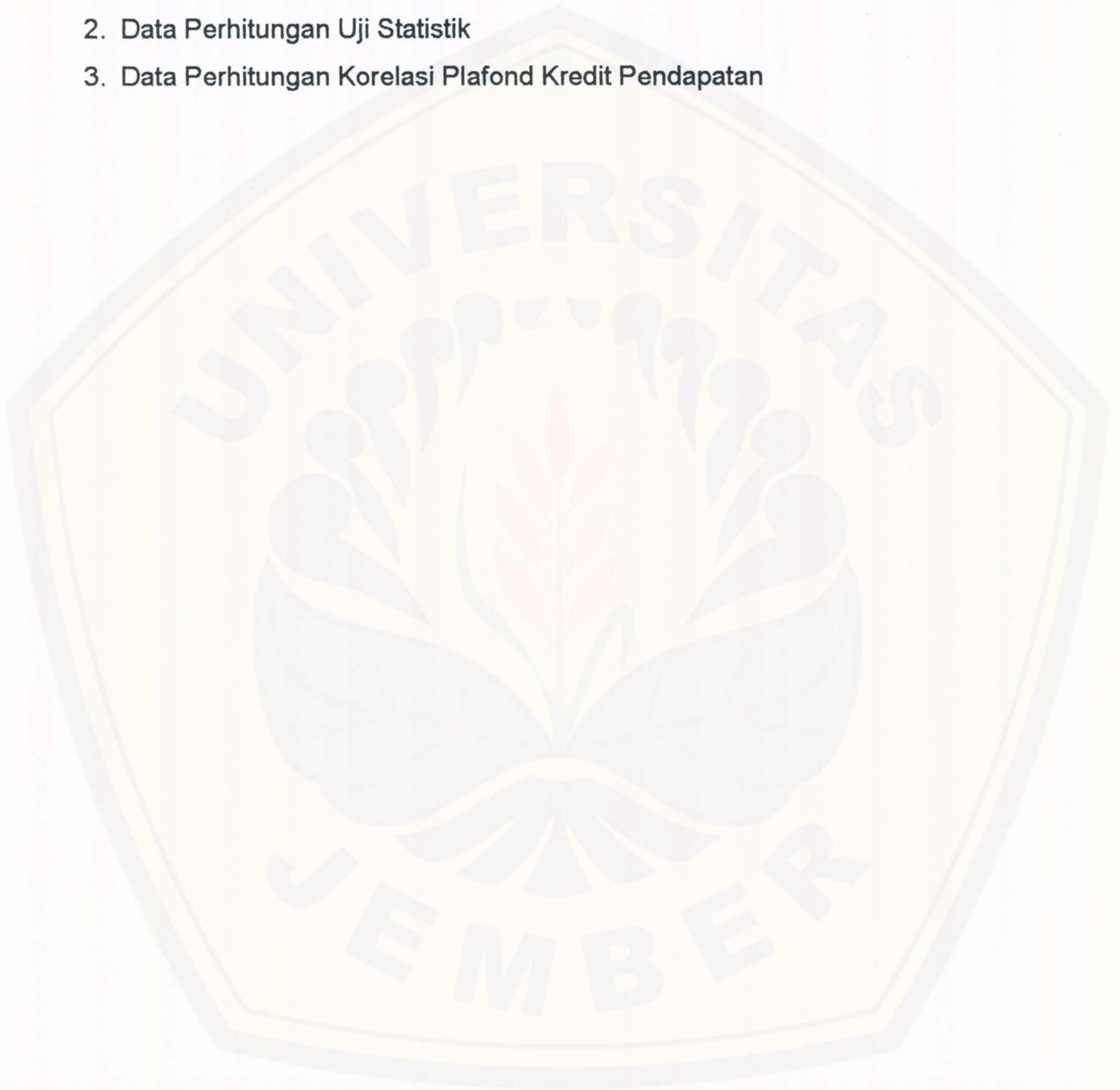
	Halaman
1. BPR Partisipan PKM di Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Jember	34
2. Data Nasabah dan kredit PKM per Kabupaten	34
3. Perkembangan jumlah nasabah dan kredit	35
4. Pengusaha Kecil Potensial Terdaftar	36
5. Distribusi Frekuensi Pendapatan	38
6. Perkembangan kinerja Proyek Kredit Mikro Bank Indonesia Jember	41
7. Perhitungan perkembangan jumlah nasabah PKM	42
8. Perhitungan perkembangan jumlah kredit yang disalurkan ..	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kegiatan PKM	12
2. Jangka Waktu Kredit	16
3. Sasaran Proyek Kredit Mikro	21
4. Organisasi	22
5. Alternatif penyaluran kredit I	24
6. Alternatif penyaluran kredit II	24
7. Abstraksi kurva normal	38
8. Scatter perkembangan jumlah nasabah	41
9. Scatter perkembangan jumlah kredit	42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data BPR dan Nasabah PKM
2. Data Perhitungan Uji Statistik
3. Data Perhitungan Korelasi Plafond Kredit Pendapatan



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah

Krisis ekonomi yang mulai melanda perekonomian Indonesia sejak Juli 1997 ditandai dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya dollar Amerika telah mengakibatkan terpuruknya semua sendi kehidupan perekonomian baik di sektor riil maupun moneter. Sektor perbankan sebagai jantung dari sistem perekonomian telah terpuruk ditandai dengan besarnya kredit macet. Pada sektor riil ditandai macetnya sektor usaha yang diakibatkan berbagai hal misalnya suku bunga yang sangat tinggi dan menurunnya daya beli masyarakat.

Terpuruknya perekonomian Indonesia disebabkan oleh mismanajemen pengelolaan dana perbankan, yang mengutamakan para pengusaha besar saja untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi sedang para pengusaha kecil kurang mendapat perhatian, padahal sektor ini dapat dijadikan sebagai fondasi kekuatan ekonomi bangsa. Dalam hal pendanaan dari perbankan, kucuran dana untuk para pengusaha kecil selama ini masih jauh dari harapan sebagai akibat dari paradigma pengurusan perekonomian yang disebutkan di atas. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan usaha kecil termasuk penetapan dan penyempurnaan kebijakan perkreditan, namun sampai saat ini kurangnya akses usaha kecil terhadap pelayanan perbankan.

Pemberian pinjaman (kredit) yang kecil-kecil kepada para petani, nelayan, pengusaha dan pedagang kecil di daerah-daerah pedesaan maupun perkotaan selalu dihadapkan kepada resiko yang tinggi. Dibiidang pertanian misalnya tidak jarang terjadi kegagalan-kegagalan panen karena adanya bencana alam demikian juga bidang-bidang lain. Secara spesifik kegagalan kredit kepada para pengusaha kecil disebabkan para nasabah tersebut pada umumnya terdiri dari orang-orang yang kurang mendapatkan pendidikan khusus, sehingga kemampuan berusaha dan kemampuan untuk mengelola keuangan sangat terbatas sekali.

Kegagalan pengusaha kecil untuk memperoleh kredit juga merupakan hambatan bagi pemberdayaan mereka. Ketidak mampuan dalam penyediaan agunan dan kelayakan usaha merupakan alasan utama.

Untuk memberdayakan para pengusaha kecil, Bank Indonesia bekerja sama dengan Asia Development Bank (ADB) melaksanakan Proyek Kredit Mikro (PKM), PKM merupakan pengembangan usaha kecil/mikro di pedesaan melalui penguatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP), dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) baik untuk nasabah perorangan maupun kelompok.

1.2 Perumusan Masalah

Proyek Kredit Mikro telah berjalan hampir 4 tahun, tentunya penyaluran kredit bagi nasabah pengusaha skala kecil telah banyak dikeluarkan. Dengan makin banyaknya kredit PKM tersebut perlu adanya penelitian efektifitas dari proyek tersebut. Efektivitas dari PKM terhadap perkembangan pendapatan pengusaha skala kecil ditunjukkan dengan beberapa pertanyaan :

(1). Apakah hubungan antara kredit yang diberikan dengan pendapatan para pengusaha kecil setelah mendapat fasilitas kredit mikro; (2) Apakah ada perbedaan pendapatan antara sebelum dan sesudah diberikan diberikan kredit mikro; (3) Dan bagaimanakah perkembangan pendapatan serta perkembangan nasabah sesudah memperoleh fasilitas kredit.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan antara kredit yang diberikan dengan pendapatan pengusaha kecil setelah mendapat fasilitas kredit mikro,

2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat pendapatan antara sebelum dan sesudah para pengusaha diberikan kredit mikro.
3. Untuk mengetahui perkembangan jumlah nasabah mikro dan besarnya kredit mikro yang disalurkan setelah diberikan fasilitas kredit mikro.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak terkait baik instansi pemerintah maupun non pemerintah khususnya pihak yang berkepentingan dalam ikut mengembangkan para pengusaha mikro, misalnya dunia perbankan, pemerintah dan mitra-mitra usaha pengusaha mikro.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dikemukakan beberapa penelitian sebelumnya serta landasan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini, agar nantinya dapat dipakai sebagai dasar penentuan hipotesis yang diajukan.

2.1 Tinjauan hasil penelitian sebelumnya :

2.1.1 Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hariati, 1994 dengan judul : Peranan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Terhadap Tingkat Pendapatan Peternak Ayam Ras di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, dimana tujuan yang ingin dicapai adalah : untuk mengetahui tingkat pendapatan yang menggunakan modal dari kredit umum pedesaan dan untuk mengetahui peranan kredit umum pedesaan terhadap tingkat pendapatan peternak ayam ras di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan didapat hasil sebagai berikut :

- a) Ada hubungan positif antara realisasi kredit umum pedesaan dengan tingkat pendapatan peternak ayam ras. Hal ini berarti semakin besar realisasi kredit umum pedesaan, semakin besar pula tingkat pendapatan peternak ayam ras.
- b) Peranan kredit umum pedesaan terhadap tingkat pendapatan peternak ayam ras sebesar 70%, berarti keterikatan pendapatan terhadap realisasi kredit adalah besar. Kenaikan tingkat pendapatan rata-rata sebesar 35%, berarti kenaikan tingkat pendapatan sangat dipengaruhi besarnya kredit.

2.1.2 Penelitian yang dilakukan oleh Retno Poernomo H, 1995 dengan judul : Pengaruh Kredit Perbankan dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Produk Domestik Bruto Di Propinsi Daerah Tkt.I Jawa Timur selama kurun waktu 1988 – 1992, dimana tujuan yang ingin dicapai adalah : untuk mengetahui pengaruh pemberian kredit perbankan dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) di



Propinsi Daerah Tk.I Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapat hasil bahwa Kredit Perbankan dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDRB).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Bank

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 1 dijelaskan antara lain mengenai pengertian Perbankan, Bank, sebagai berikut :

“ Perbankan adalah, Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

“ Bank adalah, Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Adapun berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dalam BAB III Pasal 5 dijelaskan bank menurut jenisnya terdiri dari :

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Umum adalah, bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran”.

Bank Umum dapat dibagi menjadi :

- Bank Umum Pemerintah,
- Bank Umum Swasta

Bank Umum Swasta dapat pula dibagi menjadi :

- Bank Umum Swasta Nasional dan
- Bank Umum Swasta Asing.

2.2.2 Fungsi dan Sifat Usaha Bank Umum

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (pasal 3), fungsi utama perbankan adalah "sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat" sedangkan tujuannya (pasal 4) adalah "bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak".

Usaha Bank Umum meliputi (pasal 6) :

- a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b) memberikan kredit;
- c) menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d) membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
- e) memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

- k) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- i) menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- m) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan tersebut di atas Bank Umum dapat pula (pasal 7) :

- a) melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d) bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2.2.3 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah (pasal 13) "bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Usaha Bank Perkreditan rakyat meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- b. Memberikan kredit
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain
(Pasal 13 UU No.10 tahun 1998)

Berdasarkan Pasal 8 UU No.7 Tahun 1992 BPR dapat pula :

- a) dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, BPR wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- b) BPR wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Perkreditan Rakyat dilarang :

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

Tugas bank diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan dan juga diperkotaan serta untuk mengurangi praktek ijon dan para pelepas uang. Sedangkan fungsi utama bank adalah menarik dan menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya untuk kegiatan produktif, sehingga perbankan menempati posisi yang strategis dalam perekonomian dan pembangunan sekaligus pemerataan pembagian pendapatan di dalam masyarakat.

Bank-bank umum di Indonesia belum sepenuhnya menjangkau lapisan masyarakat kecil baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Oleh karena itu perlu difikirkan dan diusahakan pendirian bank yang dapat melayani kebutuhan para petani, peternak, nelayan, pedagang dan pengusaha kecil serta pemerataan pelayanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan.

2.2.4 Pelayanan perkreditan bagi pengusaha kecil

Perhatian perbankan di Indonesia terhadap kredit kecil ini adalah sangat kurang, hal ini dikarenakan pinjaman yang sangat kecil disertai resiko pemberian kredit yang tinggi dan memakan banyak tenaga dan biaya, maka pinjaman-pinjaman seperti itu tidak menguntungkan dan karena itu tidak ekonomis menurut ukuran bank umum komersial (Mubyarto, 1991: 213). Tetapi pada tahun 70-an pemerintah mulai mendasarkan strategi pembagunan ekonominya pada tiga sasaran yaitu pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas, dengan prioritas pada aspek pemerataan. Berbagai kredit program yang dikembangkan sejak saat itu untuk melayani kebutuhan kredit bagi usaha kecil dari golongan ekonomi lemah yaitu antara lain KIK, KMKP pada tahun 1973, kredit mini tahun 1974, KCK dan Kredit Inpres tahun 1976 dll. Sebagian besar dari kredit program tersebut dilaksanakan oleh bank-bank pemerintah dan sebagian kecil saja yang disalurkan melalui bank-bank umum swasta dan KUD. Kalau pada akhirnya tujuan untuk mewujudkan pemerataan terutama aspek permodalan kepada golongan ekonomi lemah seperti sekarang ini, barangkali terjadi banyak pelaksanaan yang tidak sesuai dengan setting pada awal kredit itu mulai diperkenalkan.

Modal merupakan masalah bagi masyarakat kecil dalam mengembangkan usahanya baik di daerah pedesaan maupun di kota-kota di seluruh Indonesia. Untuk mengembangkan dan memajukan usaha-usaha tersebut disamping penyuluhan dan pembinaan tentunya diperlukan pula permodalan. Karena terbatasnya jangkauan perbankan, maka masalah peranan pelepas uang yaitu

rentenir, pengijon dan tengkulak, yang akibatnya dapat mempengaruhi pemasaran dari hasil produksi para produsen kecil tersebut serta mengurangi kesejahteraannya. Dengan membantu dalam pelayanan kebutuhan permodalan atau perkreditan dapat merupakan upaya untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat sehingga memperluas kesempatan kerja yang dapat membantu penyerapan kelebihan tenaga kerja yang ada dalam masyarakat terutama di daerah pedesaan, yang karena lajunya perkembangan jumlah penduduk terdapat banyak pengangguran atau pengangguran tidak kentara.

Pememenuhan kebutuhan kredit kepada petani dan nelayan, pengusaha dan pedagang kecil memerlukan perlakuan khusus antara lain : pemberian kredit harus murah, mudah, tepat waktu dan tepat pula jumlahnya. Kredit murah artinya bunga dan biaya lainnya haruslah serendah-rendahnya. Sedangkan mudah untuk memperolehnya berarti prosedur sederhana dan tidak berbelit-belit. Kemudian tepat berarti penerimaan penjaminan agar tepat waktu kredit.

2.2.5 Proyek Kredit Mikro (PKM)

Dalam rangka membantu pemerintah meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja, menanggulangi kemiskinan, serta meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan, Bank Indonesia bersama-sama ADB melaksanakan Proyek Kredit Mikro, yang merupakan proyek pengembangan usaha mikro di pedesaan melalui penguatan BPR, LDKP dan LPSM serta penyaluran kredit kepada nasabah pengusaha mikro, baik perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok. Naskah perjanjian luar negeri (Loan Agreement) antara pemerintah RI dan AdB ditandatangani tanggal 10 Januari 1995, yang berlaku efektif mulai 21 Juli 1995 dan pelaksanaan pemberian kredit PKM dimulai tanggal 8 April 1996. Keterkaitan ADB untuk membiayai PKM di Indonesia disebabkan oleh keberhasilan pengembangan LDKP, BPR serta sejumlah proyek pengentasan kemiskinan di Indonesia seperti pembinaan

peningkatan pendapatan petani kecil dan pengembangan hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat (PHBK).

Dalam mendukung program pengentasan kemiskinan di Indonesia perlu lebih dikembangkan usaha-usaha mikro di pedesaan yang bersifat informal karena memiliki potensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan biaya investasi yang rendah dan dapat menciptakan pendapatan kaum miskin. Selama ini di tingkat pedesaan telah beroperasi banyak lembaga-lembaga kredit pedesaan yang memberikan kredit kepada rakyat di lingkungan masing-masing. LDKP dan BPR yang terbukti telah membantu rakyat dan pengusaha mikro ini perlu ditingkatkan kinerjanya agar dapat memperluas pelayanan. Untuk mendidik rakyat pedesaan agar dapat menjalankan usaha mikro ini demi meningkatkan pendapatan mereka diperlukan bantuan LPSM, oleh karena banyak dari mereka yang belum terjangkau oleh pembinaan teknis dari instansi pemerintah terkait. Oleh karena itu proyek kredit mikro berupaya juga untuk meningkatkan kemampuan LPSM dalam rangka membina usaha mikro.

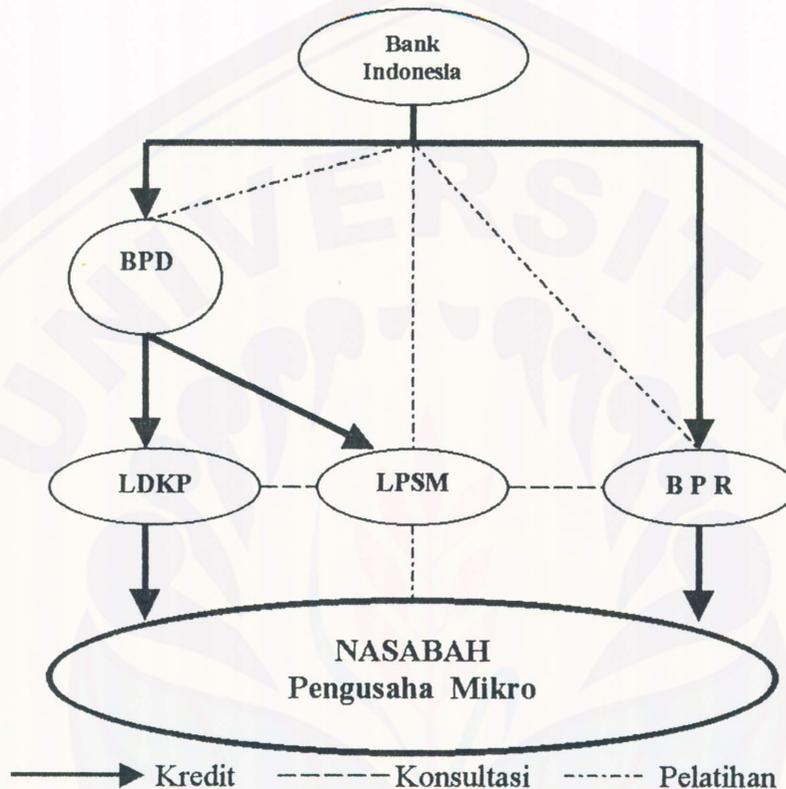
Adapun tujuan dari kredit mikro adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja di pedesaan termasuk meningkatkan peranan wanita dalam aktivitas pembangunan serta menanggulangi kemiskinan.
- b. Mengembangkan usaha mikro di pedesaan melalui penguatan BPR, LDKP dan LPSM serta melayani kredit kepada nasabah pengusaha mikro baik secara perorangan maupun kelompok.

Sedangkan lingkup kegiatannya adalah :

- c. Penyaluran kredit kepada masyarakat yang melaksanakan usaha mikro guna mengembangkan usahanya melalui BPR dan LDKP.
- d. Penguatan BPR dan LDKP melalui penyediaan dana untuk kredit mikro, kredit komputer dan kredit sepeda motor serta pelatihan agar dapat memperluas jasa pelayanan keuangan yang layak untuk pengembangan dan kesinambungan usaha mikro.

- e. Penguatan LPSM melalui penyediaan kredit komputer dan sepeda motor serta pelatihan agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengorganisasikan kelompok rakyat miskin dan mendekati miskin, menyediakan pelatihan ketrampilan yang sesuai serta kegiatan lainnya yang dapat membantu meningkatkan pendapatan.



Gambar : 1 Kegiatan PKM

Untuk tahap pertama PKM dilaksanakan di 5 propinsi, yaitu : Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat dengan mempertimbangkan :

- Jumlah BPR dan LDKP yang dapat memenuhi persyaratan proyek
- Kemampuan BPD mengawasi dan mendukung LDKP dan efektifitas KBI, mengawasi operasi BPD dan BPR
- Jumlah penduduk miskin

Untuk tahap selanjutnya akan diperluas di propinsi lain, walaupun bukan Bank Indonesia yang melaksanakan busa dijadikan acuan untuk pengembangan usaha kecil oleh lembaga yang berkepentingan. Jangkawaktu pelaksanaan proyek PKM adalah sejak tanggal 21 Juli 1995 s/d 30 Juli 2001 dengan sasaran proyek diharapkan dapat mengangkat kehidupan 300.000 nasabah yang terutama berdomisili di desa-desa non IDT melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Dari 300.000 nasabah tersebut, diharapkan sepertiga diantaranya tergabung dalam kelompok pengusaha mikro (KPM) dan dua pertiga sisanya merupakan perorangan. Khusus mengenai PKM diharapkan terdiri dua pertiga rakyat miskin dan sepertiga mendekati miskin, serta 50% wanita. Diharapkan pula sejumlah sepertiga dari seluruh nasabah adalah masyarakat yang miskin sementara sisanya mendekati miskin. Dari sisi gender diharapkan sepertiga nasabah adalah wanita. Peran pengentasan kemiskinan dan peningkatan keterlibatan wanita dalam proyek terutama dilakukan oleh LPSM yang diminta untuk mengikutsertakan 50% wanita dan dua pertiga rakyat miskin dalam KPM. BPD di wilayah PKM mempunyai kedudukan khusus oleh karena diikutsertakan dalam proyek dalam fungsinya sebagai pembina LDKP bukan dalam fungsinya sebagai bank umum. BPD bertugas menyalurkan kredit yang diterima dari KBI kepada LDKP dan LPSM dan bertanggungjawab atas pengembalian kredit yang diterima dalam rangka PKM.

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Pedesaan (LKP) adalah BPR dan LDKP yang melayani rakyat di pedesaan yaitu:

- a. BPR adalah sebagaimana dimaksud dalam UU No.7 tahun 1992 yang disempurnakan dengan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan yang memenuhi persyaratan sebagai peserta PKM.
- b. LDKP adalah lembaga yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Dati I dan atau Pemerintah Dati II, yang bergerak dibidang pelayanan, keuangan kepada masyarakat, yang memenuhi persyaratan sebagai peserta PKM yang untuk tahap ini terdiri :

- Lembaga perkreditan kecamatan (LPK) di Jawa Barat
- Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan
- Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil (LKURK) di Jawa Timur
- Lumbung Kredit Pedesaan (LKP) di Nusa Tenggara Barat

LKP bertugas menyalurkan kredit yang diterima kepada nasabah pengusaha mikro dan bertanggung jawab atas pengembalian kredit yang diterima dalam rangka PKM.

Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam instruksi Menteri Dalam Negeri No.8 tahun 1990, tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat yang meliputi persyaratan PKM

Tugas LPSM dalam PKM adalah :

- a. Membina masyarakat miskin dan mendekati miskin di pedesaan (termasuk wanita) agar melakukan usaha itu.
- b. Mengembangkan para pengusaha mikro agar dapat meningkatkan pendapatannya
- c. Menghubungkan pengusaha mikro agar dapat memperoleh kredit dari BPR/LDKP peserta PKM untuk mengembangkan usahanya.

Proyek Kredit Mikro ini dibiayai oleh dana yang berasal dari pinjaman lunak ADB, hibah dari pemerintah Norwegia dan Bank Indonesia. Dana yang disediakan untuk proyek ini adalah sebesar USD 42,5 juta, yang terdiri dari SDR 17.469.000,00 (equivalent USD 25,7 juta) dari ADB, dan kurang lebih USD 16,8 juta dari Bank Indonesia, ditambah hibah pemerintah Norwegia sebesar MKr 7,5 juta, kredit yang diteruskan kepada lembaga peserta terdiri :

- a. Kredit untuk diteruskan kepada nasabah pengusaha mikro, dan
- b. Kredit kepada BPD, BPR, LDKP untuk pembelian komputer dan kendaraan bermotor

Suku bunga kredit yang berlaku adalah sebagai berikut :

- a. Suku bunga dari Bank Indonesia ke BPD sebesar suku bunga acuan per tahun, baik untuk pembelian komputer dan kendaraan bermotor yang digunakan oleh BPD sendiri, maupun untuk kredit yang akan diteruskan kepada LDKP dan LPSM.
- b. Suku bunga dari Bank Indonesia ke BPR dan BPD kepada LPSM sebesar 2% di atas suku bunga acuan
- c. Suku bunga dari BPD kepada LDKP kepada nasabah pengusaha mikro adalah sebesar suku bunga pasar yang berlaku bagi BPR dan LDKP masing-masing suku bunga acuan (reference rate)/RR adalah suku bunga rata-rata selama 6 bulan terakhir yang terendah antara lain :

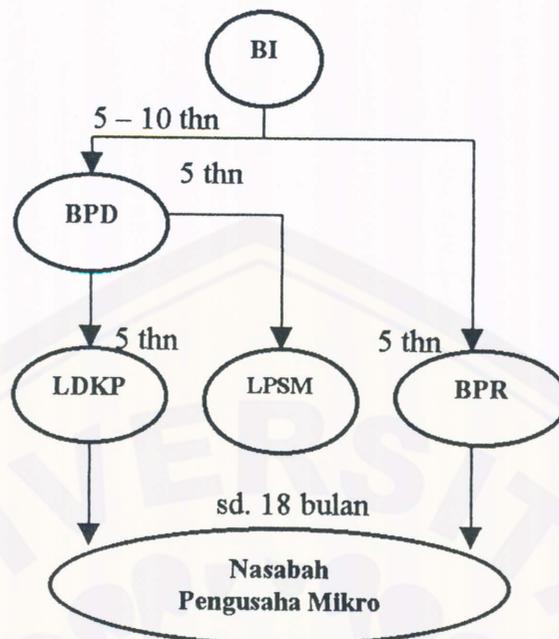
(1) Suku bunga deposito berjangka waktu 3 bulan di bank pemerintah dan

(2) Suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka waktu 90 hari

Suku bunga acuan diumumkan setiap 6 bulan, yaitu setiap tanggal 15 Januari (berlaku dari 1 Januari – 30 Juni) dan 15 Juli (berlaku 1 Juli – 31 Desember).

Belakangan suku bunga acuan tidak menganut di atas mengingat suku bunga acuan SBI naik sangat tinggi sehingga kalau diterapkan akan sangat memberatkan baik BPR ataupun BPD dan LDKP sehingga bunga dari Bank Indonesia ditetapkan 22,6% per tahun dan selalu ditinjau lagi setiap 6 bulan sedangkan untuk bunga kepada nasabah ditetapkan bunga pasar.

Jangka waktu kredit kepada BPD untuk pembelian komputer dan kendaraan bermotor roda empat adalah 10 tahun sejak akad kredit. Jangka waktu kredit kepada BPR dan BPD untuk diteruskan kepada LDKP dan LPSM untuk pembelian komputer dan sepeda motor adalah 5 tahun sejak kredit. Jangka waktu kredit kepada BPR dan kepada BPD untuk diteruskan kepada LDKP untuk nasabah pengusaha mikro adalah 5 tahun sejak akad kredit.



Gambar 2 : Jangka waktu kredit

Proyek Kredit Mikro pada dasarnya diarahkan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. melalui PKM diusahakan untuk mengembangkan usaha-usaha mikro di perdesaan yang bersifat informal karena memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja dengan investasi rendah dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin atau mendekati miskin.

Melalui pemberian kredit mikro kepada pengusaha mikro tersebut diharapkan terjadi peningkatan terhadap pendapatan mereka. Atau dalam artian, terdapat perbedaan tingkat pendapatan pengusaha mikro sebelum dan sesudah menerima kredit mikro. Bila ini yang terjadi berarti tujuan dari pelaksanaan PKM dapat dikatakan tercapai.

Menurut BPS (1999) definisi kemiskinan adalah setara dengan 2100 kalori ditambah kebutuhan dasar, untuk masyarakat perdesaan definisi kemiskinan setara dengan Rp.41.580,00 per kapita per bulan atau sama dengan Rp.207.000,00 per rumah tangga per bulan.

Sayogya (1999) berpendapat bahwa garis kemiskinan setara dengan 320 Kg beras/ orang/tahun. Dengan asumsi harga beras adalah Rp.3.000,00/Kg,

batas garis kemiskinan adalah Rp.80.000,00 perkapita per bulan atau sama dengan Rp.400.000,00 per rumah tangga per bulan.

Menurut data PBB (1999), batas garis kemiskinan adalah masyarakat yang mempunyai pendapatan sebesar Rp.212.500,00 per kapita per bulan atau sama dengan Rp.1.062.500,00 per rumah tangga per bulan.

Berdasarkan data survai sosial tengah waktu Proyek Kredit Mikro (1998), rata-rata pendapatan rumah tangga miskin adalah Rp.91.591,00 per kapita per bulan atau sama dengan Rp.457.955,00 per rumah tangga per bulan.

Dalam pelaksanaan Proyek Kredit Mikro, batas garis kemiskinan yang digunakan berdasarkan data BPS (1999). Dengan adanya pelaksanaan Proyek Kredit Mikro, diharapkan adanya peningkatan pendapatan rumah tangga miskin sebesar Rp.52.750,00 per kapita per bulan atau Rp.633.000,00 per kapita per tahun, dan menaikkan Hari Orang Kerja (HOK) menjadi di atas 125 HOK per kapita per tahun.

Dalam mendukung program kemiskinan tersebut, Proyek Kredit Mikro mengembangkan usaha mikro di tingkat perdesaan melalui penguatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan (LDKP) dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM). Penguatan terhadap BPR dan LDKP dilakukan melalui penyediaan dana kredit mikro, kredit komputer, dan kredit sepeda motor. Disamping itu penguatan terhadap BPR ini juga dilakukan melalui pelatihan dan pembinaan. Dalam pelaksanaannya BPR dan LDKP diharapkan bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM).

Keikutsertaan LPSM dalam Proyek Kredit Mikro adalah dengan perekrutan tenaga lapangan yaitu Petugas Pendamping Usaha Mikro (PPUM) khusus untuk PKM oleh KBI. Adapun yang menjadi tugas dari Petugas Pendamping Usaha Mikro adalah :

1. Pembinaan orang miskin dan mendekati miskin di bidanhg usaha mikro yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1.1. Pembentukan Kelompok Pengusaha Mikro (KPM) yang beranggotakan 10 orang, terdiri dari 2/3 miskin, 1/3 mendekati miskin, dan 50% wanita dari keseluruhan binaan LPSM.
- 1.2. Pelatihan kepada Kelompok Pengusaha Mikro agar mampu melakukan usaha mikro di perdesaan .
2. Pengembangan pengusaha mikro agar dapat meningkatkan pendapatannya. Pengembangan dapat dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok melalui kegiatan pendampingan dan konsultasi usaha mikro dalam bidang teknik produksi, pemasaran produk, manajemen dan pembukuan sederhana.
3. Penghubungan KPM dengan BPR/LDKP agar memperoleh kredit untuk pengembangan usahanya apabila KPM telah mampu menghasilkan keuntungan untuk membayar angsuran dan bunga.

Dengan demikian BPR dan LDKP yang bekerjasama dengan PPUM dari LPSM diharapkan dapat memperluas jasa pelayanan keuangan untuk pengembangan dan kesinambungan usaha mikro. Ini berarti dengan pelaksanaan PKM diharapkan terjadi peningkatan terhadap kinerja BPR dan LDKP.

Kinerja BPR dalam pelaksanaan PKM dapat dilihat melalui :

1. Tingkat kesehatan minimum 3 bulan terakhir berturut-turut cukup sehat
2. Tingkat kecukupan modal (CAR) minimum 8%
3. Tingkat pengembalian kredit minimum 80%, yang dinyatakan dengan KAP sekurang-kurangnya cukup sehat.
4. Dipimpin oleh manajemen yang cukup sehat.
5. Untuk BPR yang keikutsertaan PKM lamanya ≥ 2 tahun, memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - Porsi kredit dengan plafond Rp.1.000.000,00 ke bawah minimum mencapai 25% dari jumlah seluruh kredit
 - Rasio antara jumlah seluruh dana masyarakat yang dihimpun dengan jumlah seluruh kredit minimum mencapai 30%

6. Untuk BPR yang keikutsertaan PKM lamanya < 2 tahun, memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Porsi kredit dengan plafond Rp.1.000.000,00 ke bawah >5% dari jumlah seluruh kredit.
- Rasio antara jumlah seluruh dana masyarakat yang dihimpun dengan jumlah seluruh kredit > 10%

Sedangkan kinerja LDKP dalam pelaksanaan PKM dapat dilihat melalui :

1. Tingkat kesehatan minimum 3 bulan terakhir berturut-turut cukup sehat atas penilaian dari BPD.
2. Tingkat kecukupan modal yang dinyatakan dengan perbandingan antara jumlah modal, cadangan dan laba dikurangi kredit macet, dengan nilai seluruh aktiva minimum 8%.
3. Tingkat pengembalian kredit yang dinyatakan dengan perbandingan antara jumlah kredit lancar dan kurang lancar dengan jumlah seluruh kredit minimum 80%.
4. Dipimpin oleh manajemen yang bertanggungjawab dan berpengalaman.
5. Untuk LDKP yang keikutsertaan PKM lamanya \geq 2 tahun, memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - Porsi kredit dengan plafond Rp.1.000.000,00 ke bawah minimum mencapai 25% dari jumlah seluruh kredit
 - Rasio antara jumlah seluruh dana masyarakat yang dihimpim dengan jumlah seluruh kredit minimum mencapai 30%.
6. Untuk LDKP yang keikutsertaan PKM lamanya <2 tahun memehuhi kriteria sebagai berikut :
 - Porsi kredit dengan plafond Rp.1.000.000,00 ke bawah >5% dari jumlah seluruh kredit
 - Rasio antara jumlah seluruh dana masyarakat yang dihimpun dengan jumlah seluruh kredit > 10%.

Dalam pengalokasian kredit mikro, nilai kredit pertama yang dapat diterima pengusaha mikro adalah sampai dengan Rp.500.000,00 dan untuk usaha mikro tertentu dapat mencapai Rp.1.000.000,00 sesuai dengan kebutuhan usahanya. Apabila usaha mikro dapat berkembang secara baik maka dapat dipertimbangkan pemberian kredit bertahap sampai dengan Rp.2.000.000,00 ini berarti jumlah kredit yang diberikan tersebut diharapkan dapat secara optimal dimanfaatkan oleh pengusaha mikro.

Untuk beberapa jenis usaha dan pengusaha mikro tertentu, besar kecilnya kredit mikro yang diterimanya akan dapat mempengaruhi keberhasilan usahanya. Dalam kerangka pemikiran yang demikian perlu dilakukan penganalisaan secara cermat mengenai tingkat kredit mikro yang diterima dengan tingkat keberhasilan pengusaha mikro. Keberhasilan ini dapat dicermati dari tingkat pendapatan yang diperolehnya dari usaha mikro yang didanai dengan kredit mikro.

Sasaran dari pelaksanaan PKM diharapkan dapat mengangkat kehidupan 300.000 nasabah yang terutama berdomisili di desa-desa non IDT melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Dari 300.000 nasabah tersebut diharapkan 1/3 diantaranya tergabung dalam kelompok pengusaha mikro (KPM) dan 2/3 sisanya merupakan perorangan. Khusus mengenai KPM diharapkan terdiri dari 2/3 rakyat miskin dan 1/3 mendekati miskin serta 50% wanita. Dasisi gender diharapkan 1/3 nasabah adalah wanita. Peran pengentasan kemiskinan dan peningkatan keterlibatan wanita dalam proyek terutama dilakukan oleh LPSM yang diminta untuk mengikutsertakan 50% wanita dan 2/3 rakyat miskin dalam Kelompok Pengusaha Mikro.

300.000 Pengusaha Mikro

- Dari sisi Kelompok

1/3	2/3
Kelompok	Perorangan

- Dari sisi Gender

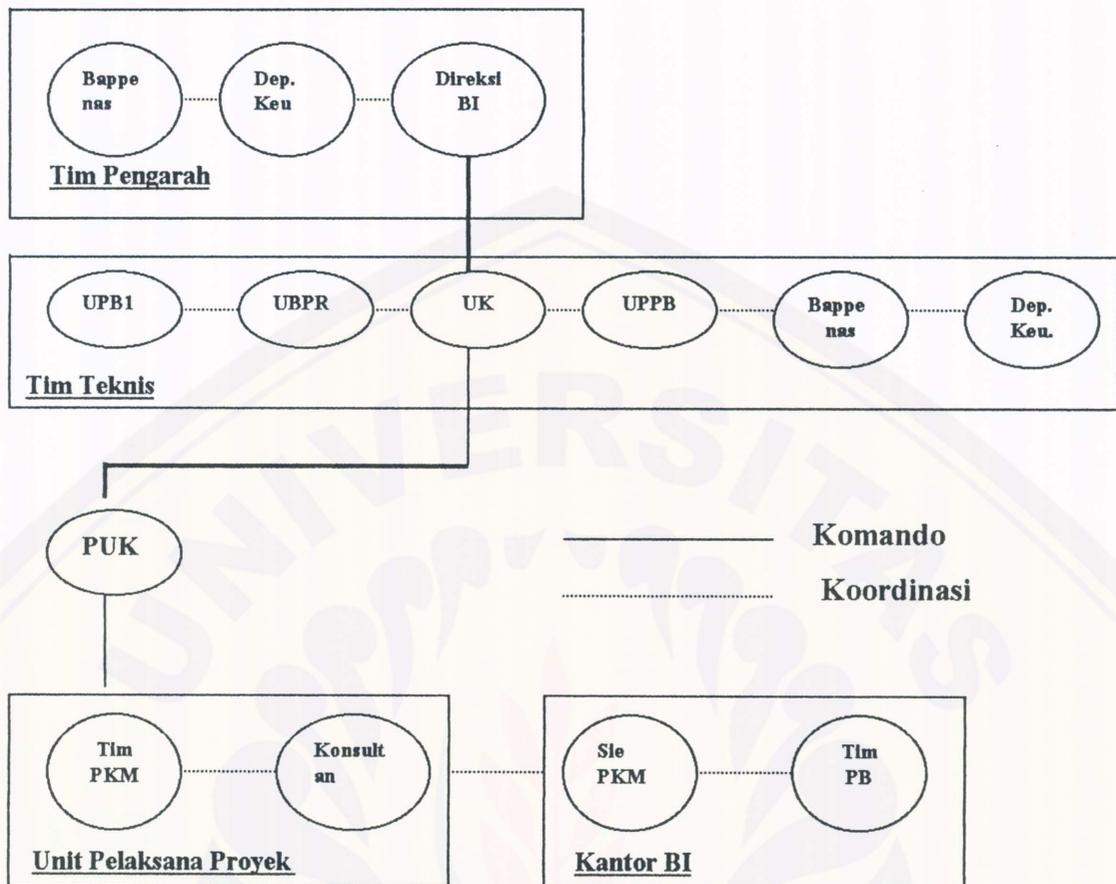
1/3	2/3
Wanita	Bukan Wanita

- Dari sisi Kemiskinan

1/3	2/3
Miskin	Mendekat Miskin

Gambar 3 : Sasaran P K M

Untuk dapat memberikan arahan kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan PKM dibentuk sebuah Tim Pengarah di tingkat nasional berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia No.28/19/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1995 tentang pembentukan Tim Pengarah PKM. Anggota Tim Pengarah terdiri dari pejabat-pejabat eselon 1 atau yang sederajat dari 3 instansi yaitu : Bappenas, Departemen Keuangan dan Bank Indonesia yang terdiri dari Deputi Bidang Fiskal dan Moneter Bappenas, Dirjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan, Direktur Bidang Perkreditan Bank Indonesia yang merangkap sebagai Ketua Tim. Tim Pengarah mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun. Dibawah ini bagan Organisasi dan kinerja Koordinasi antara Lembaga Pemerintah dengan Bank Indonesia.



Gambar 4 : Organisasi

Arti Pendapatan bagi Pengusaha Mikro

Dalam hal pengelolaan keuangan usahanya, ada perbedaan yang pokok antara Pengusaha Mikro dengan pengusaha umumnya (pengusaha yang lebih besar, menengah dan besar). Para pengusaha mikro mengelola keuangannya dalam suatu figure (kebiasaan = ciri-ciri) dengan **Ekonomi Rumah Tangga (PHBK, Bank Indonesia, 1998)** dimana pengelolaan keuangan usahanya tidak dibedakan antara keuangan rumah tangga (keluarga) dengan keuangan usahanya dengan kata lain pengelolaan keuangan dicampur menjadi satu sehingga yang namanya pendapatan bagi pengusaha mikro adalah seluruh pendapatan anggota keluarga yang diperolehnya baik dari pengelolaan usahanya maupun dari kemungkinan pendapatan lain dari anggota keluarganya.

Menghitung pendapatan keluarga artinya menjumlah semua penghasilan yang diperoleh oleh semua anggota keluarga dari berbagai jenis sumber. Memang kadangkala kesulitan timbul bilamana tidak semua anggota keluarga menyetorkan penghasilannya kepada seorang pengelola biasanya istri/ibu rumah tangga. Istilah uang laki-laki adalah bagian atau jenis penghasilan suami yang tidak disetor kepada isteri dan tentunya tidak tercatat. Dalam analisa semacam ini tidak akan dimasukkan kedalam bagian pendapatan karena tentunya disamping susah untuk memprediksi juga umumnya jumlahnya tidak begitu berpengaruh terhadap penghasilan secara keseluruhan karena kalau pendapatan yang tidak terdeteksi semacam ini terlalu besar atau dominan maka dalam sekejap ekonomi rumah tangga akan sangat mudah sekali kolaps dan hal ini mudah saja untuk menggoncangkan ekonomi rumah tangga itu sendiri. Dalam mengelola ekonomi rumah tangga diperlukan unsur-unsur penting sebagai berikut :

1. Pendapatan keluarga
2. Rencana pengeluaran
3. Catatan realisasi pendapatan dan pengeluaran
4. Pandangan dan sikap yang tepat tentang tabungan
5. Musyawarah keluarga (suami-istri dan anak-anak)

Konsep operasional Variabel adalah sebagai berikut :

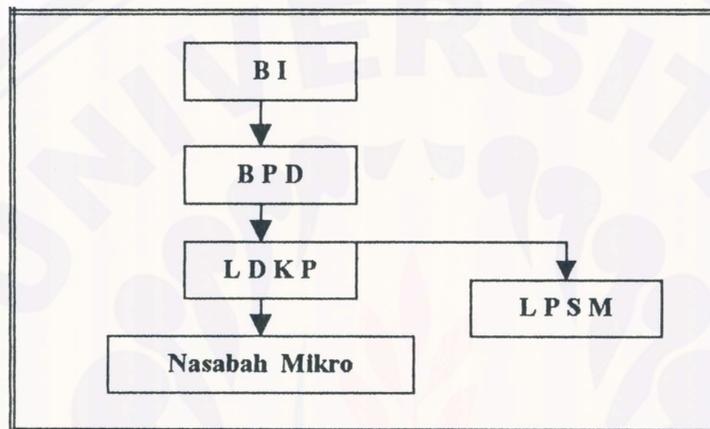
- a. Tingkat pendapatan pengusaha mikro sebelum mendapat fasilitas kredit mikro adalah pendapatan rata-rata per bulan sebelum memperoleh fasilitas kredit
- b. Tingkat pendapatan pengusaha mikro setelah mendapatkan fasilitas kredit mikro adalah pendapatan rata-rata per bulan setelah memperoleh fasilitas kredit
- c. Kredit yang diberikan kepada para pengusaha mikro adalah penyediaan uang/dana atau tagihan dari BPR/LKP berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak pegusaha mikro

- d. yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Adapun mekanisme penyaluran kredit Proyek Kredit Mikro adalah sebagai berikut :

1) Alur Satu

Bank melakukan hubungan keuangan secara langsung dengan nasabah mikro. LPSM berfungsi untuk melatih dan membina nasabah, dan memperoleh fee dari bank berdasarkan tingkat bunga, volume dan kinerja pengembalian kredit nasabah kepada bank.

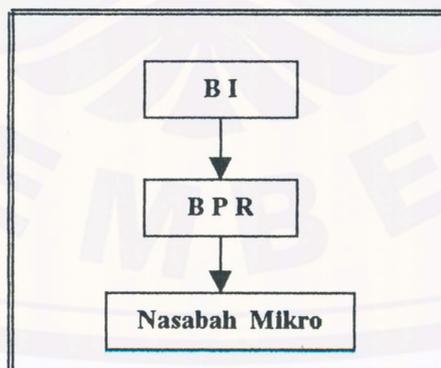


Sumber : PKM BI, 1995

Gambar : 5 Alur penyaluran kredit I

2) Alur dua

Bank langsung berhubungan dengan nasabah. Pembentukan pelatihan maupun pembinaan nasabah dilakukan sendiri oleh Bank (Anonim, 1995 :4)



Sumber: PKM BI, 1995

Gambar: 6 Alur penyaluran kredit II

III. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun, 1988 : 131). Data yang diperoleh secara faktual tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan pembenaran terhadap kondisi yang benar-benar realistis (Nasir, 1988 : 211).

Lokasi yang dijadikan pengambilan sampel untuk penelitian adalah Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi dimana daerah-daerah tersebut adalah lingkup wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Jember dan di daerah-daerah ini BPR menyalurkan kredit dalam rangka Proyek Kredit Mikro (PKM). Secara kebetulan karakteristik dari ke empat daerah tersebut sedikit berbeda baik secara geografis, kultural maupun sebaran para pengusaha kecil dan BPR yang ada.

3.2 Populasi dan Sampel

Kantor Bank Indonesia melalui BPR-BPR yang ada di wilayah kerjanya sampai dengan saat ini telah mengakses sejumlah kurang lebih 15.000 nasabah mikro. Jumlah ini tersebar di Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Sasaran penelitian yang dilakukan adalah 100 sampel responden nasabah mikro. Sampel ini bisa juga mewakili dari seluruh nasabah mikro yang telah diakses oleh seluruh Kantor Bank Indonesia.

Karena cukup luasnya wilayah dan terbatasnya tenaga dan sarana maka tidak mungkin dilakukan penelitian terhadap keseluruhan populasi yang ada, maka diambil sampel sebanyak 100 nasabah tersebut. Adapun teknik

pengambilan sampel adalah dengan **Proporsional Random Sampling (Sumadi, 1983:90)** dimana setiap daerah akan diambil sampelnya berdasarkan jumlah sebaran BPR secara proporsional sebagai berikut:

- Jember = 50 responden
- Banyuwangi = 30 responden
- Situbondo = 10 responden
- Bondowoso = 10 responden
- Jumlah = 100 responden

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan dikumpulkan dari dua sumber yaitu :

Data primer : data ini dikumpulkan langsung dari responden / pengusaha mikro yang terpilih sebagai sampel. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan bantuan kuesioner terstruktur.

Data sekunder : data ini diperoleh dari Instansi terkait baik dari Bank Perkreditan Rakyat, LDKP LPSM maupun dari Kantor Bank Indonesia. Dukungan kepustakaan melalui laporan dan jurnal ilmiah, data dari Bank Indonesia Jember serta informasi lainnya juga digunakan. Data yang bersifat rahasia tetap dijaga kerahasiaannya (**Undang-Undang No.10/1998 pasal 1 ayat 28**).

3.4. Definisi variabel operasional dan pengukurannya

- a. Y_{-1} = Tingkat pendapatan pengusaha mikro sebelum mendapat fasilitas kredit mikro adalah pendapatan rata-rata per bulan sebelum memperoleh fasilitas kredit
- b. Y = Tingkat pendapatan pengusaha mikro setelah memperoleh fasilitas kredit mikro adalah pendapatan rata-rata per bulan setelah memperoleh fasilitas kredit.
- c. X = Kredit yang diberikan kepada para pengusaha mikro adalah penyediaan uang/dana atau tagihan dari BPR/LKP berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak pengusaha mikro yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

3.5 Metode Analisis data

Teknik analisis data dilakukan dengan dua cara yaitu :

3.5.1 Analisis secara kuantitatif

Sebanyak 100 sampel yang telah dikumpulkan dari para nasabah dianalisis. Data yang diteliti secara kuantitatif ini meliputi pendapatan sebelum dan sesudah diberifasilitas kredit juga pemberian suku bunga yang berbeda-beda.

- 1) Untuk menghitung Korelasi antara besarnya kredit terhadap pendapatan yang diperoleh pengusaha mikro , dilakukan dengan uji korelasi dengan Rumus Korelasi (Anto Dajan, 1986 : 315) sebagai berikut :

$$r = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

dimana :

X = Kredit yang diberikan

Y = Tingkat pendapatan

- Bila $r = 0$ atau mendekati 0, maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali,
- Bila $r = +1$ atau mendekati 1, maka korelasi antara 2 variabel dikatakan positif dan sangat kuat sekali,
- Bila $r = -1$ atau mendekati -1 maka korelasinya dikatakan sangat kuat dan negatif.

2) Untuk mengetahui jawaban permasalahan kedua pertama-tama dilakukan Uji Beda Z (Samsubar Saleh, 1986 : 95). Nilai kritis dari pengujian satu arah, berdasarkan Tabel Kurva Normal standar = $Z_{0,005} = 1,645$

Rumusnya :

$$Z = \frac{d}{Sd / \sqrt{n}}$$

dimana :

$d = \bar{\varepsilon}d$ = perbedaan tingkat pendapatan

$$Sd = \sqrt{\frac{\varepsilon d^2 - (\bar{\varepsilon}d)^2/n}{n}}$$

n = jumlah sampel yang akan diuji

formulasi H_0 dan H_1

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$

Tidak ada peningkatan tingkat pendapatan para pengusaha mikro setelah diberi fasilitas kredit

$H_1 : \mu_1 > \mu_2$

Ada peningkatan pendapatan nasabah mikro lebih besar setelah diberi fasilitas kredit mikro.

Taraf signifikansi yang dipakai adalah 0,05 dengan $n = 100$ (sebelum memperoleh fasilitas kredit dengan notasi X dan setelah memperoleh kredit dengan notasi Y).

Nilai kritis dari pengujian satu arah, berdasarkan Tabel Kurva Normal Standar $= Z_{0,005} = 1,645$

- 3). Untuk mengetahui perkembangan jumlah nasabah mikro dan besarnya kredit mikro yang disalurkan setelah diberikan fasilitas kredit mikro dengan menggunakan Rumus : Trend Linier (Nugroho, Djuzali, Abubakar, 1985 : 302) sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

dimana :

a = pendapatan pengusaha rata² atau dalam periode depan

b = perkembangan pendapatan per tahun/bulan

X = Unit tahun/bulan

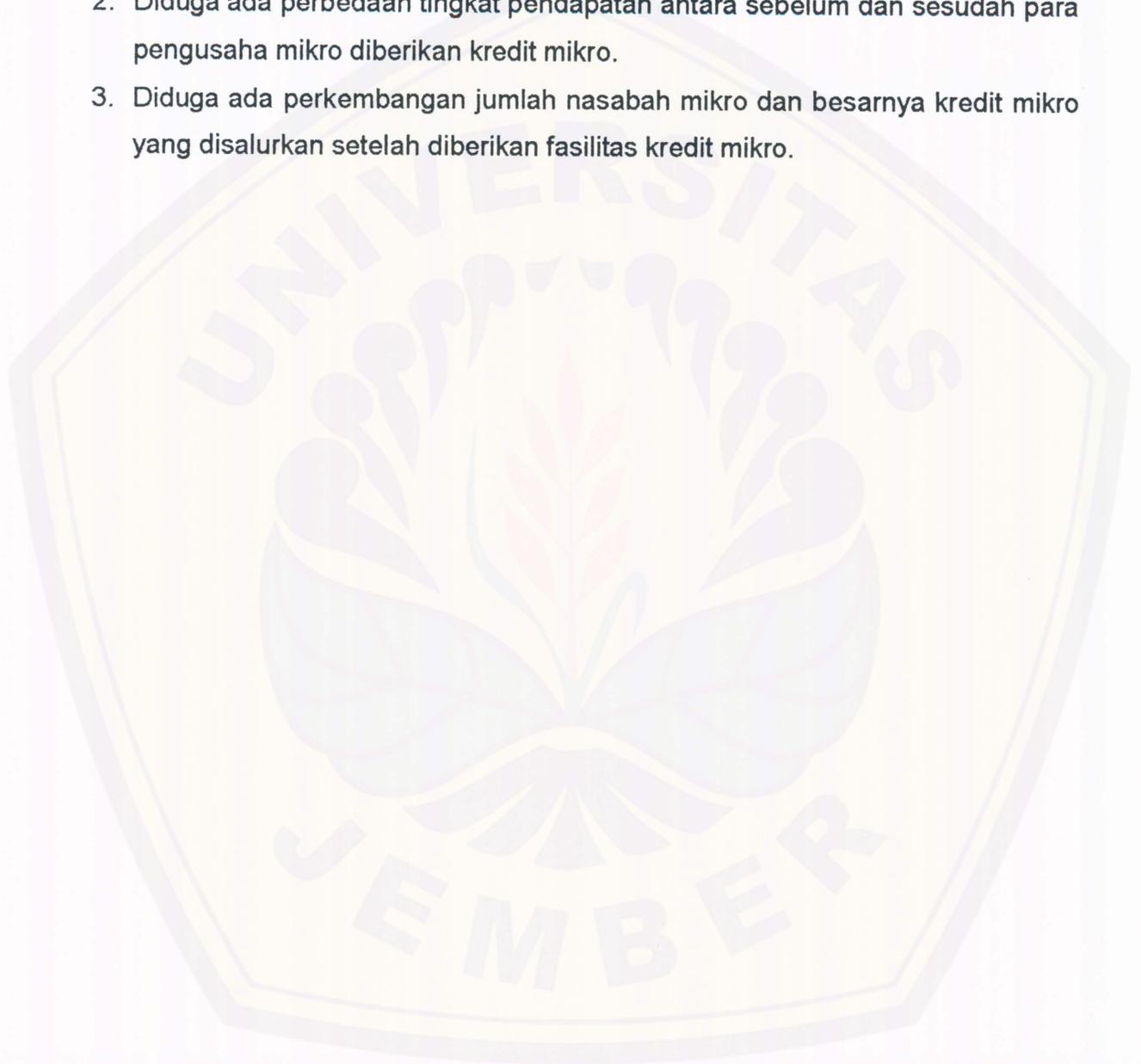
3.5.2 Analisis Data Secara Kualitatif

Analisis data dilakukan dengan menelusuri metode-metode/prosedur-prosedur ataupun pemberdayaan yang dilakukan berupa pelayanan oleh BPR dan juga cara pengelolaan dana oleh nasabah. Bagi nasabah ditelusuri apakah kredit bermanfaat baik secara ekonomis maupun psikologis misalnya nasabah merasa senang dapat dilayani oleh lembaga perbankan dan manfaat lain yang akan digali melalui daftar pertanyaan yang disebarkan kepada mereka. Akan dicoba digali pula seberapa jauh minat para nasabah dalam upayanya untuk menabung dari hasil usahanya itu. Trend perkembangan pemberian kredit dan jumlah nasabah juga akan dicoba untuk diprediksikan kemungkinan pengembangan lebih lanjut.

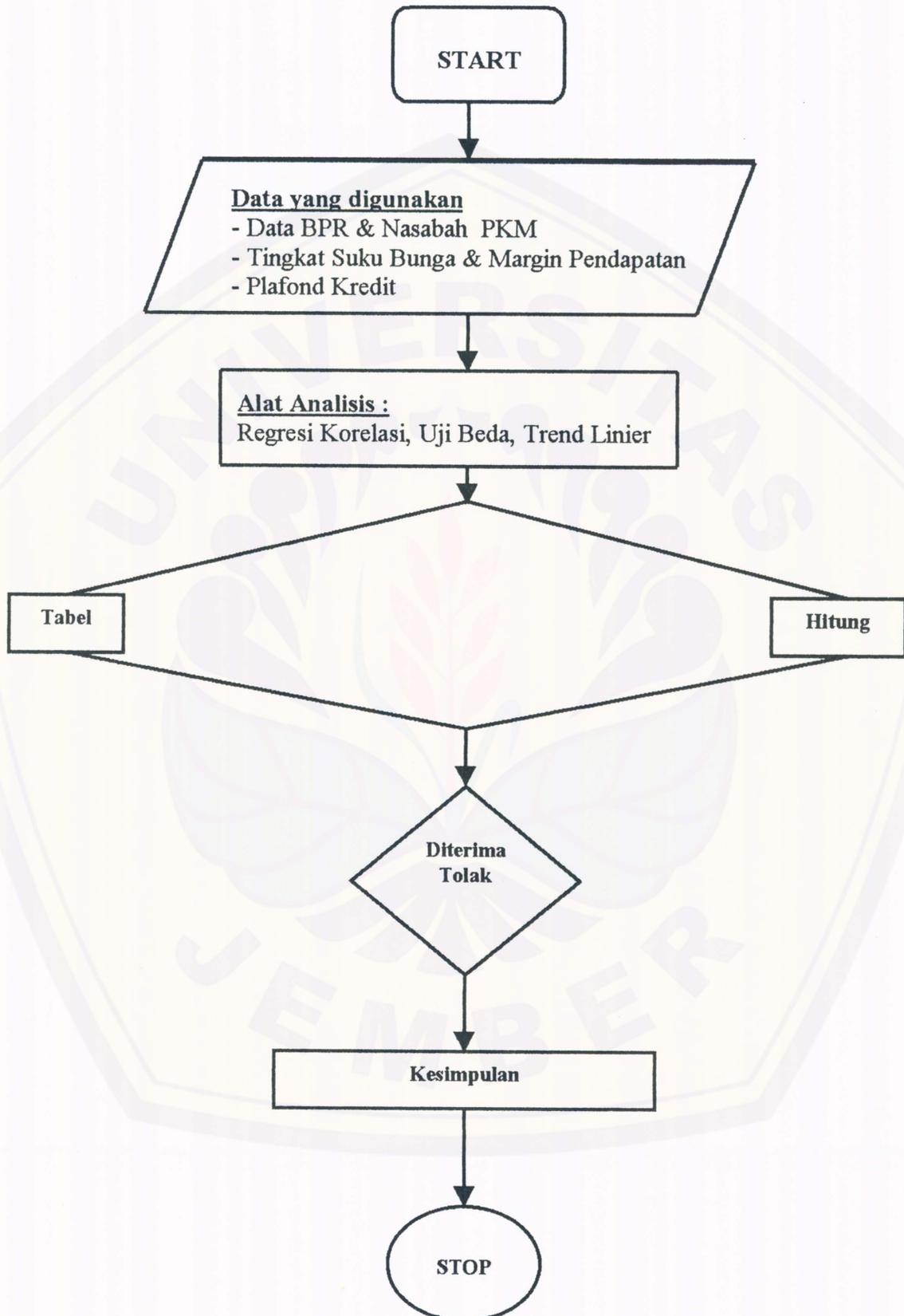
3.6. Hopitesis

Berdasarkan uraian di atas dan latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga ada hubungan antara kredit yang diberikan dengan pendapatan para pengusaha kecil setelah mendapat fasilitas kredit mikro.
2. Diduga ada perbedaan tingkat pendapatan antara sebelum dan sesudah para pengusaha mikro diberikan kredit mikro.
3. Diduga ada perkembangan jumlah nasabah mikro dan besarnya kredit mikro yang disalurkan setelah diberikan fasilitas kredit mikro.



3.7 Kerangka Pemecahan Masalah



Keterangan Kerangka Pemecahan Masalah :

1. Menyebar kuesioner kepada responden di empat Kabupaten yaitu: Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi secara proporsional dengan melihat jumlah sebaran dari Bank Perkreditan Rakyat di setiap Kabupaten dengan jumlah seluruh responden 100 orang.
2. Mengolah Input yang ada untuk melihat perbedaan tingkat pendapatan pengusaha kecil sebelum dan sesudah mendapat kredit PKM dengan variabel pengamatan:
 - Tingkat pendapatan sebelum dan sesudah mendapat fasilitas kredit mikro.
 - Tingkat suku bunga yang diberikan
 - Plafond kredit.
3. Untuk menghitung korelasi antara besarnya kredit terhadap pendapatan yang diperoleh pengusaha mikro dengan menggunakan rumus Korelasi dan Uji beda Z dan , juga melihat perkembangan jumlah kredit dan jumlah nasabah dimasa yang akan datang dengan Trend Linier.
4. Dari hasil uji beda diketahui Z_{hitung} setelah itu dibandingkan dengan Z_{tabel}
5. Dari perbandingan Z_{hitung} dengan Z_{tabel} dapat ditentukan daerah Diterima dan Ditolak untuk menarik Simpulan dan Saran bagi kelanjutan Proyek Kredit Mikro ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Perkreditan bagi Pengusaha Kecil Golongan Ekonomi Lemah senantiasa mendapat porsi relatif besar, tercermin dari fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) posisi bulan Maret 2000 mencapai Rp.560,72 milyar atau 52,90% terhadap total kredit perbankan. Namun fasilitas tersebut belum seluruhnya dapat menjangkau kegiatan usaha mikro (sektor informal) kelompok masyarakat berpendapatan rendah di pedesaan. Perhatian Bank Indonesia terhadap usaha kecil dan mikro, senantiasa diupayakan pengembangannya yaitu melalui bantuan teknis dan penciptaan serta penyempurnaan beberapa skim kredit untuk pengusaha kecil/mikro dan koperasi.

Dalam rangka bantuan teknis, Bank Indonesia mensosialisasikan pola pembinaan kepada pengusaha kecil/mikro dengan memperkenalkan konsep-konsep PPUK (PUK, PHBK dan PKM) dalam pembinaannya, yang dilakukan melalui berbagai forum pertemuan dengan melibatkan instansi terkait dan perbankan, yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan seperti : lokakarya/seminar, pelatihan dan studi banding, dengan harapan agar program kerja masing-masing lembaga yang berhubungan dengan pemberdayaan pengusaha mikro/kecil dapat dilaksanakan dengan lebih terkoordinasi dan terarah dengan perbankan sebagai lembaga yang memberikan pelayanan keuangan.

Sedangkan kinerja Proyek Kredit Mikro di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Jember meliputi :

a. Jumlah BPR/LDKP peserta PKM

Di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Jember sam[pai akhir Maret 2000 ada 32 BPR/LKP peserta PKM yang tersebar di 4 wilayah Kabupaten/Daerah Tingkat II dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1, BPR Partisipan PKM Di Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Jember

No	Kabupaten	Jumlah BPR
1.	Jember	17 BPR
2.	Banyuwangi	12 BPR
3.	Bondowoso	2 BPR
4.	Situbondo	1 BPR
	JUMLAH	32 BPR

Sumber : Bank Indonesia Jember

Disamping BPR ada LKURK dan (Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil), yaitu Lembaga Keuangan pedesaan milik Pemda melalui BPD Jatim Cabang Banyuwangi ikut menyalurkan PKM yaitu 4 LKURK masing-masing LKURK Banyuwangi, Giri, Wongsorejo dan Kabat dan ada satu Lemgaba Swadaya Masyarakat (LPSM) Bina Swadaya di Banyuwangi. Jadi secara keseluruhan ada 36 BPR/LDKP dan 1 LPSM.

b. Jumlah nasabah mikro yang dibiayai

Semenjak proyek untuk pertama kali membiayai usaha mikro pada pertengahan tahun 1996 sampai dengan akhir Maret 2000 sebanyak 15.243 nasabah mikro di wilayah kerja Bank Indonesia Jember dibiayai. Jumlah nasabah mikro sebanyak itu tersebar di 4 wilayah Kabupaten masing-masing :

Tabel 2, Data Nasabah dan Kredit PKM Per Kabupaten

No	Kabupaten	Jumlah Nasabah	Jumlah Kredit (Rp.000)
1	Jember	6.719	4.830.044
2	Banyuwangi	8.525	4.066.084
3	Bondowoso	860	715.120
4	Situbondo	313	249.750
	JUMLAH	16.417	9.861.000

Sumber : Bank Indonesia Jember

BPR di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 12 BPR mampu menyalurkan kepada 8.525 nasabah dengan total kredit sebesar Rp.4.066.084 ribu dan BPR di Kabupaten Jember dengan 17 BPR menyalurkan kepada 6.719 nasabah dengan jumlah kredit sebesar Rp.4.830.044 ribu dan di 2 kabupaten lainnya perkembangannya relatif kecil.

c. Perkembangan nasabah dan jumlah kredit yang disalurkan

Jumlah nasabah dan jumlah kredit dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan. Hal ini nampak pada tabel berikut :

Tabel 3, Perkembangan Jumlah Nasabah dan Kredit

(Rp Juta)

Tahun	1997		1998		1999		2000/Maret	
Jumlah Nasabah	850	1.750	4.901	6.670	8.555	11.712	16.417	—
Jumlah Kredit	1.125	3.044	3.995	5.205	7.488	8.340	9.861	—

Sumber : Kantor Bank Indonesia Jember

d. Pengusaha kecil potensial terdaftar

Data mengenai berapa jumlah sesungguhnya masyarakat yang menerjuni pengusaha mikro di 4 kabupaten secara pasti memang belum ada karena sifat dari para pengusaha mikro yang mudah masuk dan meninggalkan usahanya. Tetapi jumlah para pengusaha mikro yang telah terdaftar baik oleh instansi pemerintah maupun non pemerintah cukup banyak. Ini terlihat dari hasil pemetaan yang dilakukan Bank Indonesia Jember pada tahun 1998. Para pengusaha bergerak di berbagai sektor ekonomi. Dari hasil pemetaan para pengusaha kecil terdaftar di 4 kabupaten adalah sebagai berikut :

Tabel 4, Pengusaha Kecil Potensial Terdaftar

No.	KABUPATEN	Jumlah pengusaha mikro yang terdaftar
1.	Banyuwangi	4.385 orang
2.	Bondowoso	3.936 orang
3.	Jember	44.240 orang
4.	Situbondo	1.525 orang
	J U M L A H	54.086 orang

Sumber : Kantor Bank Indonesia Jember

Pengusaha ini umumnya telah menggeluti bidang usahanya sudah cukup lama. Mereka umumnya telah banyak menggeluti bidang usaha lebih dari 5 tahun bahkan banyak pula yang sudah lebih dari 10 tahun, sehingga daya tahan dan keuletannya umumnya sudah teruji sehingga kalau diberdayakan dan dapat diakses oleh dunia perbankan khususnya BPR cukup potensial. Dari sekian banyak pengusaha kecil ini umumnya masih sedikit sekali yang terakses oleh bank. Kendala untuk mengakses mereka umumnya tetap pada alasan klasik yaitu secara sosial ekonomis lemah, secara geografis masih sulit dijangkau dan secara bank teknis mereka juga masih lemah, manajemen lemah, kemampuan lemah dan bank sendiri sedikit enggan untuk menekuni dengan alasan resiko cukup tinggi untuk melayani mereka. Kendala geografis memang akan nampak dari pemetaan yang dilakukan sendiri untuk wilayah selain Jember masih sulit dijangkau sehingga baru sedikit berhasil diidentifikasi. Para pengusaha ini bergerak di berbagai bidang usaha dari mulai usaha di bidang kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, juga barang-barang kerajinan rumah tangga, cinderamata. Dari sekian banyak pengusaha kecil yang berhasil diidentifikasi dan dipetakan sebagian besar memang masih pengusaha yang bergerak di bidang usaha yang berhubungan dengan hasil pertanian.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Korelasi besarnya kredit dengan pendapatan yang diperoleh pengusaha mikro.

Korelasi besarnya kredit dengan pendapatan yang diperoleh pengusaha mikro dihitung dengan menggunakan Rumus korelasi (Anto Dajan, 1986 : 315) dengan hasil sebagai berikut :

$$r = \frac{100(32.005.750) - (202.500)(14.750)}{\sqrt{[100 \times 434.730.000 - (202.500)^2][100 \times 3.210.150 - (14.750)^2]}}$$

$$r = 0,42304 \text{ atau } = 42,30\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya kredit yang diberikan kepada para pengusaha mikro tidak secara otomatis berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan koefisien korelasi sebesar 0,42304 berarti ada 42,30% pengaruh besarnya kredit mikro terhadap pendapatan nasabah, sedangkan 57,70% pendapatan nasabah tersebut dipengaruhi oleh variabel di luar kredit mikro. (Tabel 10.1 sd 4 lampiran 3).

4.2.2 Menghitung perbedaan tingkat pendapatan

Dari data-data yang masuk setelah dihitung pendapatan rata-rata untuk masing-masing nasabah secara time series selama 5 bulan sebelum memperoleh kredit dan 5 bulan setelah memperoleh kredit, berdasarkan lampiran Lampiran 2 Tabel 9.1 sd 9.4 maka untuk rata-rata pendapatan per bulan (X_1) sebelum memperoleh kredit untuk 100 nasabah responden adalah sebesar Rp.49.442. Rata-rata pendapatan per bulan (X_2) setelah mendapatkan kredit sebesar Rp.77.993. Pendapatan tersebut adalah pendapatan kotor dari usaha mikro yaitu hasil keseluruhan (bagi pedagang adalah omzet dikurangi modal usahanya baik kredit maupun modal sendiri).

Dari data pendapatan baik sebelum maupun sesudah memperoleh kredit yang dikompilir, angka-angkanya ada kecenderungan membentuk kurva normal yaitu :

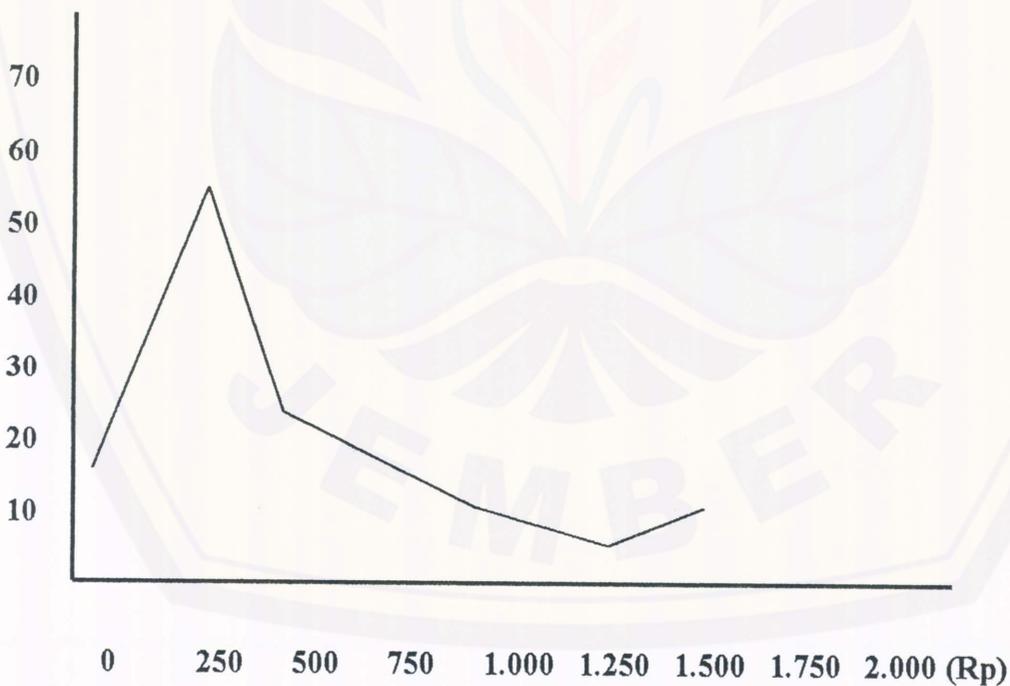
Tabel 5, Distribusi Frekuensi Pendapatan
(Rp000)

Pendapatan (setelah PKM)	Jumlah nasabah
1 – 250	12
251 – 500	50
501 – 750	21
751 – 1.000	5
1.001 – 1.250	2
1.251 – 1.500	3
1.501 – 1.750	1
1.751 – 2.000 >	5

Data diolah

Dari data di atas dapat diabstraksikan suatu kurva jumlah nasabah dan tingkat pendapatan yang kecenderungannya membentuk kurva normal seperti nampak pada grafik di bawah ini :

Nasabah



Gambar 7 : Abstraksi kurva normal

Dengan demikian perhitungan untuk mendapatkan angka perbedaan pendapatan dapat dihitung dengan rumus statistik dengan distribusi normal untuk perbedaan antara dua variabel yaitu variabel pendapatan sebelum kredit dan variabel pendapatan setelah kredit. Berdasarkan Tabel 9.1 sd 4 lampiran 2 didapat angka pendapatan sebelum kredit untuk 100 nasabah dapat dihitung standar deviasinya dengan menggunakan rumus Uji beda : Samsubar Saleh, 1986 : 95)

$$Z = \frac{d}{Sd / \sqrt{V_n}}$$

$$Sd = \sqrt{\frac{\sum d^2 - (\sum d)^2/n}{n}}$$

$$n = 100$$

d = perbedaan pendapatan setelah kredit dikurangi sebelum kredit

$$\sum d = 28.921$$

$$\bar{d} = \frac{\sum d}{n} = \frac{28.921}{100} = 289,21$$

$$Sd = \sqrt{\frac{28.403.057 - (28.921)^2 / 100}{100}}$$

$$= 447,67$$

Jadi simpangan baku dari data pendapatan adalah 447,67

Uji hipotesis:

$$H_0 : \mu_2 = \mu_1$$

$$H_1 : \mu_2 > \mu_1$$

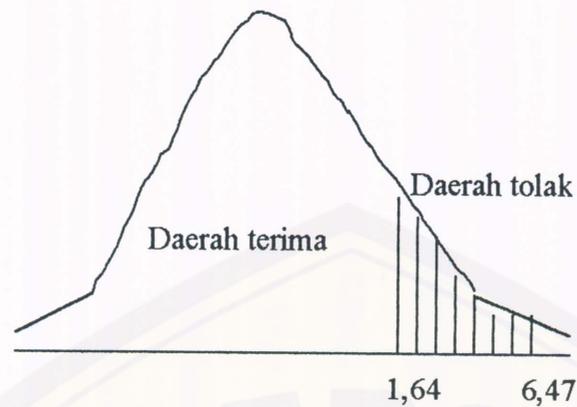
Nilai Z 0,05 = 1,64 (pengujian satu sisi kanan)

H0 diterima apabila :

$$Z < 1,64$$

H0 ditolak apabila :

$$Z > 1,64$$



$$Z = \frac{d}{Sd / \sqrt{V_n}}$$

$$= \frac{289,21}{447,67 \sqrt{100}} = 6,47$$

Z_{hitung} ternyata $(6,47) > Z_{tabel} (1,64)$ H_0 ditolak dan H_a (Hipotesis Alternatif) diterima sedangkan dari hasil perhitungan menghasilkan angka yang lebih besar dari 1,64 yaitu 6,47 dan letaknya berada disebelah kanan nilai kritis berarti H_0 (Hipotesis) yang mengatakan tidak ada perbedaan pendapatan setelah para pengusaha mikro diberi fasilitas kredit ditolak dan sebagai hasilnya adalah H_a (Hipotesis Alternatif) yang memberikan angka-angka bahwa pendapatan para pengusaha mikro mengalami peningkatan pendapatan setelah diberi fasilitas kredit diterima.

4.2.3 Perkembangan jumlah nasabah, dan jumlah kredit yang disalurkan.

Kinerja Proyek Kredit Mikro dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan baik dari segi banyaknya nasabah maupun portofolio kredit. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada di Bank Indonesia Jember dari tahun 1996 sampai dengan 1999

Tabel 6, Perkembangan Kinerja Proyek Kredit Mikro Bank Indonesia Jember

No	Item	1996		1997		1998		1999	
		S.I	S.II	S.I	S.II	S.I	S.II	S.I	--
1	Nasabah (orang)	850	1.750	4.901	6.670	8.555	11.712	16.417	--
2	Kredit (Rp.juta)	1.125	3.044	3.995	5.205	7.488	8.340	9.861	--

Sumber data : Bank Indonesia Jember

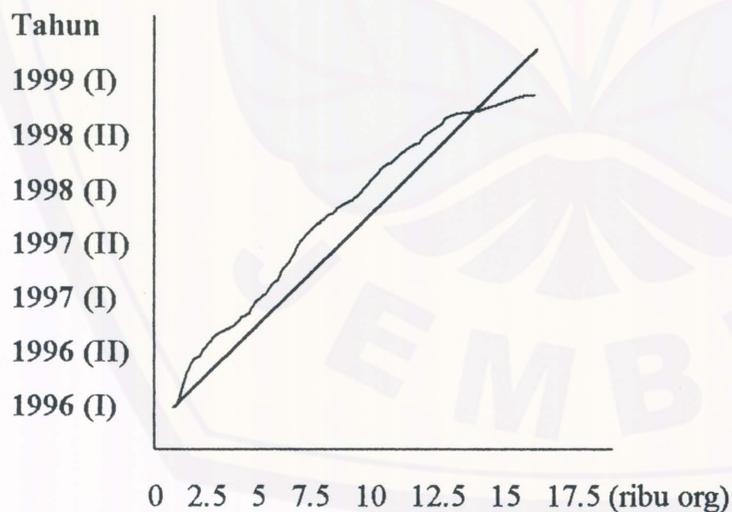
Dari data di atas nampak bahwa kinerja Proyek Kredit Mikro terus mengalami perkembangan baik jumlah nasabah maupun protfolio kredit. Tingkat perkembangan untuk masa mendatang dengan asumsi pertumbuhan yang ada kecenderungan linear (membentuk suatu garis lurus) maka dapat diperkirakan dengan menggunakan persamaan trend linier (Nugroho, Djuzali, Abuzar, 1985: 302) sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

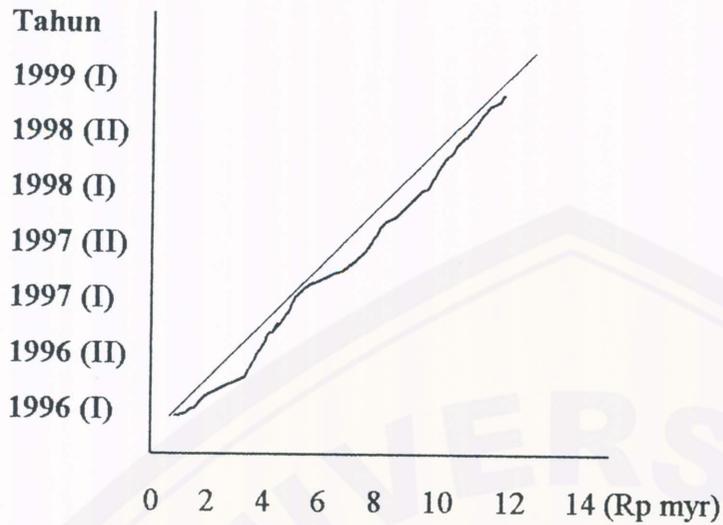
$$(1) n \cdot a + b \sum X = \sum Y$$

$$(2) a \cdot \sum X + b \sum X^2 = \sum (XY)$$

Tingkat perkembangan yang kecenderungannya linier dapat diabstraksikan dengan data yang dikompilasi seperti tersebut di atas dan abstraksi kurvanya adalah seperti gambar di bawah ini :



Gambar : 8 scatter perkembangan jumlah nasabah



Gambar : 9 scatter perkembangan jumlah kredit

Dengan rumus tersebut di atas maka untuk memperkirakan perkembangan pelaksanaan pemberian kredit di masa-masa mendatang dalam kondisi ceteris paribus, dapat diketahui perkembangan jumlah nasabah sebagai berikut :

Tabel 7, Perhitungan Perkembangan Jumlah Nasabah PKM

Tahun	X (waktu)	Y (Jml.nsb)	X ²	XY
'96 Smt I	- 3	850	9	- 2.550
'96 Smt II	- 2	1.750	4	- 3.500
'97 Smt I	- 1	4.901	1	- 4.901
'97 Smt II	0	6.670	0	0
'98 Smt I	1	8.555	1	8.555
'98 Smt II	2	11.712	4	23.424
'99 Smt II	3	16.417	9	49.251
Jumlah	0	50.855	28	70.279

Besarnya a dan b bisa dihitung dari persamaan normal yaitu :

$$(1) n \cdot a + b \sum X = \sum Y \text{ atau } a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$a = \frac{50.855}{7}$$

$$a = 7.265$$

$$(2) a \sum X + b \sum X^2 = \sum (XY) \text{ atau } b = \frac{\sum (XY)}{\sum X^2}$$

$$b = \frac{70.279}{28}$$

$$b = 2.509$$

Sehingga persamaan untuk perkembangan jumlah nasabah adalah

Y = tahun dasar yaitu tahun 1997 Semester II

$$Y = a + bX$$

$$Y = 7.265 + 2.509X$$

Jadi perkiraan jumlah nasabah pada tahun 1999 Semester II adalah :

$$\begin{aligned} Y_{99 \text{ smt II}} &= a + bX \\ &= 7.265 + 2.509(4) \\ &= 7.265 + 10.036 \\ &= 17.301 \text{ nasabah} \end{aligned}$$

Pada tahun 2000 semester II misalnya, diperkirakan jumlah nasabah mikro akan mencapai :

$$\begin{aligned} Y_{2000 \text{ smt II}} &= a + bX \\ &= 7.265 + 2.509(6) \\ &= 7.265 + 15.306 \\ &= 22.301 \text{ nasabah, dapat dilayani PKM} \end{aligned}$$

Demikian pula Perkembangan portofolio kredit dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 8, Perhitungan Perkembangan Jumlah Kredit Yang Disalurkan.

Tahun	X (waktu)	Y (Jml.kred.yg disalurkan)	X ²	XY
'96 Smt I	- 3	1.125	9	- 3.375
'96 Smt II	- 2	3.044	4	- 6.088
'97 Smt I	- 1	3.995	1	- 3.995
'97 Smt II	0	5.205	0	0
'98 Smt I	1	7.488	1	7.488
'98 Smt II	2	8.340	4	16.680
'99 Smt II	3	9.865	9	29.595
Jumlah	0	39.062	28	40.305

Besarnya a da b bisa dihitung dari persamaan normal yaitu :

$$(1) n \cdot a + b \sum X = \sum Y \text{ atau } a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$a = \frac{39.062}{7}$$

$$a = 5.580$$

$$(2) a \cdot \sum X + b \sum X^2 = \sum (XY) \text{ atau } b = \frac{\sum (XY)}{\sum X^2}$$

$$b = \frac{40.305}{28}$$

$$b = 1.439$$

Sehingga persamaan untuk perkembangan jumlah kredit mikro adalah

Y = tahun dasar yaitu tahun 1997 Semester II

$$Y = a + bX$$

$$Y = 5.580 + 1.439X$$

Jadi perkiraan jumlah kredit mikro pada tahun 1999 Semester II adalah :

$$\begin{aligned} Y_{99 \text{ smt II}} &= a + bX \\ &= 5.580 + 1.439(4) \\ &= 5.580 + 5.756 \\ &= 11.336 \text{ atau Rp.11.336.000.000,00} \end{aligned}$$

Pada tahun 2000 semester II misalnya, diperkirakan jumlah kredit mikro akan mencapai :

$$\begin{aligned} Y_{2000 \text{ smt II}} &= a + bX \\ &= 5.580 + 1.439(6) \\ &= 5.580 + 8.616 \\ &= 14.196 \text{ atau Rp.14.196.000.000,00} \end{aligned}$$

4.3 Pembahasan

Dari hasil perhitungan uji korelasi disimpulkan bahwa besar kecilnya kredit yang diberikan kepada para pengusaha mikro tidak secara otomatis berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh. Hal ini wajar saja mengingat faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pendapatan sangat bervariasi dari mulai besar kecilnya tingkat suku bunga pinjaman sampai hal-hal yang bersifat kualitatif misalnya keuletan para pengusaha, pengalaman dan keahlian, situasi ekonomi dan keberuntungan usaha. Analisis secara kualitatif secara rinci akan dipaparkan pada hasil daftar pertanyaan yang berhasil dikompilasi walaupun secara rinci pendapatan dipengaruhi oleh berbagai faktor atau variabel.

Dari data yang ada di Bank Indonesia Jember dapat diketahui bahwa para pengusaha mikro dalam mengangsur pinjaman ke BPR menunjukkan kolektibilitas 1. Yang perlu diingat bahwa dalam kondisi perekonomian yang masih belum menentu dimana dunia perbankan sedang mengalami keterpurukan

yang luar biasa di dalam proyek kredit mikro ini menunjukkan keadaan yang sebaliknya. Keadaan seperti ini tentu saja dapat mengundang perhatian kita bagaimana sesungguhnya kondisi para pengusaha ini dilapangan. Apakah lancarnya kredit karena ada sesuatu hal atau berjalan wajar-wajar saja sebagaimana layaknya proses kredit yang seperti biasa.

Dalam menghitung perbedaan tingkat pendapatan pengusaha mikro sebelum dan sesudah menerima fasilitas kredit mikro ditemukan $Z_{hitung} (6,47) > Z_{tabel} (1,64)$ jadi H_0 ditolak dan H_a (Hipotesis Alternatif) diterima, artinya bahwa ada perbedaan yang signifikan terhadap pendapatan pengusaha mikro sebelum diberi fasilitas kredit mikro dengan setelah diberi fasilitas kredit mikro, sehingga H_0 yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapatan setelah para pengusaha mikro diberi fasilitas kredit *ditolak* dan sebagai hasilnya adalah H_a (Hipotesis Alternatif) yang memberikan angka-angka bahwa pendapatan para pengusaha mikro mengalami peningkatan pendapatan setelah diberi fasilitas kredit *diterima*. Jadi secara jelas dapat diartikan bahwa kredit mikro dapat meningkatkan pendapatan para pengusaha mikro, dan dapat dilanjutkan.

Dari hasil perhitungan di atas dikatakan bahwa kredit yang diterima tidak secara proporsional mempengaruhi besarnya pendapatan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya pendapatan antara lain :

4.3.1 Omzet penjualan

Bagi para pengusaha mikro yang bergerak di sektor perdagangan dan industri (kerajinan) dan sesuai daftar tabel 2 jumlah sampel yang dipilih adalah sebanyak 100 nasabah dan sebanyak 88 nasabah mengalami peningkatan omzet penjualan mereka rata-rata sebesar Rp.389.000,00. Sekalipun meningkatnya omzet penjualan tentu juga diikuti oleh naiknya biaya usaha sebagai akibat naiknya harga-harga (inflasi yang cukup tinggi), namun kenaikan omzet ini tetap dapat menyumbangkan pendapatan bersih para pengusaha mikro seperti yang telah disebutkan di atas.

4.3.2 Tingkat suku bunga

Tingkat suku bunga yang dikenakan kepada para pengusaha mikro rata-rata tergolong cukup tinggi. Dari 100 sampel yang dipilih, maka besarnya suku bunga yang dikenakan kepada mereka rata-rata 45,48%. Memang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia suku bunga kepada para pengusaha mikro adalah suku bunga Pasar. Dengan suku bunga KLBI yang pada saat diadakan penelitian (kurun waktu Januari 1999 sd Januari 2000) cukup rendah yaitu hanya 15%, maka spread suku bunga yang diperoleh BPR cukup besar dengan rata-rata 20% sekalipun untuk tingkat suku bunga yang diberlakukan oleh Bank Indonesia (KLBI) tidak selalu tetap, akan ditinjau kembali setiap 6 bulan sekali dengan mengacu kepada suku bunga SBI dan suku bunga deposito perbankan (suku bunga acuan). Dalam penetapan suku bunga acuan ini memang sempat terjadi krusial ketika suku bunga perbankan naik begitu tinggi mencapai 60% per tahun sehingga patokan untuk menentukan suku bunga acuan dimana pada waktu itu (periode pertengahan tahun 1998) suku bunga SBI juga mencapai tingkat yang cukup tinggi sekitar 50%. Konsistensi tingkat suku bunga sangat peka dalam pemberian kredit terutama kepada para pengusaha kecil dimana naik turunnya suku bunga sangat berpengaruh kepada tingkat pendapatan mereka sehingga secara umum juga akan mempengaruhi kelangsungan usahanya.

Dari data sebagaimana pada lampiran 2 Tabel 23 dan berdasarkan hasil uji statistik yang telah diuraikan di atas telah terbukti bahwa pengenaan suku bunga yang lebih rendah akan berdampak positif yaitu semakin besarnya pendapatan pengusaha mikro (dalam kasus-kasus tertentu memang suku bunga yang lebih tinggi pendapatan pengusahamasih tetap tinggi pula terutama sektor-sektor ekonomi tertentu misalnya perdagangan kebutuhan pokok), maka apabila BPR/LKP akan lebih bijaksana dalam mengenakan bunga, walaupun ketentuan dari Bank Indonesia memberi kebebasan untuk mengenakan bunga pasar

kepada para pengusaha mikro, maka para pengusaha kecil ini akan lebih cepat tertolong dan peningkatan kesejahteraan mereka akan lebih cepat dicapai.

Bagi BPR/LKP sendiri suatu kali pernah dihadapkan suatu kenyataan bahwa dalam ketentuan yang ada besarnya tingkat suku bunga PKM yang dikenakan ditentukan setiap 6 bulan sekali yaitu pada setiap bulan Januari untuk periode Januari sampai dengan Juni dan bulan Juli untuk periode Juli sampai dengan Desember dengan mengacu pada tingkat suku bunga SBI dan Deposito 90 hari. Dalam kondisi perekonomian yang stabil barangkali acuan ini tidak begitu berdampak negatif artinya fluktuasi tingkat suku bunga baik SBI maupun Deposito akan bisa diikuti dan bisa ditolerir tetapi hal ini akan lain dengan yang kita hadapi saat ini yaitu unfortunately kondisi perekonomian kita mengalami ketidak menentuan bersamaan dengan pelaksanaan proyek kredit mikro tersebut dan berdampak dengan tingginya tingkat suku bunga SBI yang mencapai 50% dan deposito mencapai angka yang fantastik yaitu sekitar 70%. Dengan kenyataan ini maka muncul dilema bagi Bank Indonesia apakah tetap mengenakan suku bunga dengan acuan ke dua instrument di atas, akan tidak mungkin, dilain sisi tentunya ADB tidak mau tahu dengan perjanjian yang telah dibuat dengan Bank Indonesia dengan acuan suku bunga acuan ini.

Bank Indonesia sendiri tentunya tidak mau terlalu memberatkan baik kepada BPR/LKP maupun kepada para pengusaha mikro seandainya suku bunga dikenakan mengikuti tingkat suku bunga SBI dan deposito tetapi tidak mungkin juga mengenakan tingkat suku bunga SBI ketika masa sebelum krisis ketika bunga SBI dan deposito realtif stabil dan terkendali sekitar 10 – 12%. Disinilah titik lemah yang perlu dibenahi untuk lebih terjaminnya kelancaran proyek yang telah terbukti sangat membantu para pengusaha mikro tersebut.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini baik kuantitatif maupun kualitatif, dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Proyek kredit mikro yang dilakukan oleh Bank Indonesia telah berhasil meningkatkan pendapatan. Hal ini telah dibuktikan dengan uji statistik dengan distribusi normal terhadap 100 responden. Hasilnya nilai Z_{hitung} adalah 6,47 sedang Nilai kritis untuk sampel besar (> 30) dengan df (degree of freedom) 0,05 adalah 1,64 berarti H_0 (Hipotesis 0) ditolak dan H_a (Hipotesis Alternatif) diterima dengan posisi disebelah kanan nilai kritis 1,64. Dengan kata lain Hipotesis alternatif adalah lebih besar dari nilai kritis atau pendapatan yang diperoleh setelah kredit lebih besar dari pada sebelum memperoleh kredit.
2. Bagi pengusaha mikro semakin besar kredit yang diberikan tidak secara korelatif akan memperbesar peningkatan pendapatannya. Hal ini terbukti setelah dianalisis korelasi antara kredit yang diberikan dengan pendapatan yang diperoleh terhadap 100 responden. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya kredit yang diberikan kepada para pengusaha mikro tidak secara otomatis berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan koefisien korelasi sebesar 0,42304 berarti ada 42,30% pengaruh besarnya kredit mikro terhadap pendapatan nasabah, sedangkan 57,70% pendapatan nasabah tersebut dipengaruhi oleh variabel di luar kredit mikro.
3. Pemberian kredit meningkat dari Rp.11.336 juta untuk semester II tahun 1999 menjadi Rp.14.196 juta untuk semester II tahun 2000. Sedangkan untuk jumlah nasabah proyek kredit mikro meningkat dari 17.301 nasabah untuk semester II tahun 1999 menjadi 22.301 nasabah untuk semester II tahun 2000.

5.2. Saran

1. Kelanjutan Proyek Kredit Mikro perlu dipertahankan mengingat manfaatnya sangat terbukti sebagai sarana untuk memberdayakan para pengusaha kecil melalui lembaga perbankan dan sebagai sarana untuk terus mendidik dan mengembangkan para pengusaha mikro menghadapi pasar bebas kerana selama ini kredit yang diberikan melalui PKM adalah suku bunga pasar. Selama ini para pengusaha mikro masih terkesan untuk mengharapkan kredit-kredit program pemerintah dengan suku bunga bersubsidi dan hasilnya seperti yang kita lihat sekarang, kredit-kredit program (KIK, KMKP, KCK dll) terkesan sebagai bantuan.
2. Suku bunga yang dikenakan kepada para pengusaha mikro perlu untuk diatur agar tidak terlalu tinggi, walaupun ketentuan dari Bank Indonesia adalah bunga pasar karena dengan suku bunga yang agak rendah terbukti para pengusaha mikro dapat meningkatkan margin keuntungannya seperti yang dipaparkan pada tabel suku bunga dan pendapatan. Pengusaha yang dikenakan bunga dibawah 30% mampu meningkatkan pendapatan hampir 2 kali dibandingkan dengan yang dikenakan suku bunga sebesar lebih dari 50%. Dengan suku bunga yang lebih rendah akan sangat membantu kelangsungan usaha para pengusaha mikro yang selanjutnya akan menjadi mitra yang berkesinambungan bagi BPR sendiri.
3. Mengingat besarnya kredit yang diberikan belum tentu dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi bagi pengusaha mikro, berarti ada celah-celah yang perlu untuk dikembangkan baik bagi BPR maupun pengusaha sendiri untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada sehingga dengan semakin besarnya kredit yang diberikan akan semakin besar pula pendapatan yang akan diperoleh. Bantuan teknis yang diberikan Bank Indonesia selama ini baik berupa bantuan teknis untuk pemberdayaan pengusaha mikro secara individual maupun kelompok bantuan pendanaan (sebagai stimulator pada departemen survey) perlu dipertahankan agar keberadaan para pengusaha

mikro dapat dikembangkan karena pada hakikatnya para pengusaha mikro ini tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian stimulan dengan upaya untuk menjaga stabilitas moneter secara makro.

4. Bank Perkreditan Rakyat dan LKP perlu meningkatkan upaya untuk menjaring para pengusaha kecil mengingat jumlah mereka masih banyak dan dari data terungkap bahwa perkembangan pemberian kredit kepada mereka baik jumlah nasabahnya maupun portofolio kredit terus meningkat dengan pesat.
5. Peran BPR dan LKP perlu ditingkatkan dalam menyalurkan kredit-kredit program untuk para pengusaha kecil. BPR dapat dikembangkan untuk menyalurkan kredit program yang selama ini disalurkan melalui Bank Umum. BPR mempunyai kelebihan dalam hal kedekatannya dengan para pengusaha kecil karena segmen pasar BPR adalah para pengusaha kecil.
6. Acuan tingkat suku bunga dari Bank Indonesia kepada BPR yang selama ini adalah tingkat suku bunga SBI dan deposito perlu ditinjau ulang mengingat tingkat suku bunga kedua instrumen tersebut sewaktu-waktu mengalami fluktuasi, sehingga ketika suku bunga melambung tinggi sangat sulit untuk menentukan berapa suku bunga yang harus dikenakan kepada BPR agar perubahan tersebut tidak membawa dampak pula kepada para nasabah yang pada akhirnya mengganggu juga kelancaran proyek secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anto Dayan. 1975. *Pengantar Metode Statistik*. Jakarta : LP3ES
- Bank Indonesia. 1995. *Pembentukan Tim Pengarah Proyek Kredit Mikro*. Jakarta
- Bank Indonesia. 1998. *Pedoman Kerja Proyek Kredit Mikro*. Jakarta
- Jarwanto, Pangestu Subagyo. 1984. *Statistik Induktif*. Yogyakarta : BPFE
- Maryanto Danusaputro, Jusuf, Pandu Suharto. 199. *Monetisasi Pedesaan*. Jakarta : Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
- Mubyarto, Edy Suandi Hamid. 1986. *Kredit Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta : BPFE
- Mubyarto, Suratno. 1981. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Yogyakarta : Yayasan Agro Ekonomika
- Nasir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nugroho, Djazuli Alimurzid, Abuzar. 1985. *Rumus-Rumus Statistik*. Jakarta : CV. Rajawali
- Samsubar Saleh. *Statistik Induktif*. 1986. Yogyakarta : Liberty
- Singarimbun. 1998. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES
- Sumadi Suryabrata. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : CV. Rajawali
- Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Lampiran 1

TABEL : 8.1 Data BPR dan Nasabah PKM

No.	BPR	Nasabah	Pf kredit	Sekt. Ekonomi	Sk. Bunga/ Tahun	Pendapatan rata-rata 1 bin		Usaha Lain		Omzet		Pendapatan bersih
						Seb. PKM	Seti. PKM	Sebelum	Setelah	Sbe. PKM	Seti. PKM	
JEMBER												
1	Risa	Suk	2.000	Industri	36	500	750	0	0	400	700	100
2		Ruk	2.000	Dagang	36	150	600	0	0	0	0	50
3		Pil	1.250	Dagang	48	1.200	1.500	320	320	0	0	50
4		Sab	1.000	Dagang	39	3.000	4.500	300	300	0	0	50
5		Har	1.000	Industri	36	350	1.500	800	800	350	1.500	50
6		Jas	1.250	Industri	39	800	1.000	300	300	500	800	50
7		Nur	1.500	Dagang	39	1.800	3.750	0	0	0	0	50
8		Sit	1.000	Industri	39	7.800	9.750	0	0	0	0	75
9		Kas	1.000	Dagang	60	500	500	150	150	0	0	75
10		Mul	1.250	Dagang	60	550	600	0	0	400	500	50
11	Suartha	Sur	1.250	Dagang	36	210	300	187	337	70	105	50
12		Ahm	1.250	Dagang	60	450	600	0	0	150	200	50
13		Muh	1.250	Dagang	60	300	450	0	0	75	125	50
14		Sut	1.500	Dagang	36	270	390	0	0	72	108	75
15		Mad	1.000	Industri	36	600	900	0	0	150	108	75
16		Suy	1.500	Dagang	60	390	600	0	0	100	200	50
17		Sul	1.500	Dagang	60	510	750	0	0	131	262	150
18		Mak	2.000	Dagang	60	270	450	0	0	90	150	100
19		Sua	2.000	Dagang	60	300	450	0	0	50	75	100
20		Mus	2.000	Dagang	60	240	360	0	0	17	26	50
21	Karta	Tit	2.000	Dagang	36	400	450	0	0	1.290	155	100
22		San	2.000	Pertanian	36	300	450	0	0	0	0	100
23		Mus	1.500	Dagang	36	300	400	100	100	100	300	150
24		Sup	1.500	Dagang	36	150	300	150	150	200	350	100
25		Sul	1.500	Dagang	36	300	400	0	0	100	125	100
JUMLAH						21.640	31.700	2.307	2.457	4.245	5.789	1.900

(Rp.000)

Lampiran 1

TABEL : 8.2 Data BPR dan Nasabah PKM

No.	BPR	Nasabah	Pf kredit	Sekt. Ekonomi	Sk. Bunga Tahun	Pendapatan rata-rata / bth Seb. PKM	Setl. PKM	Usaha Lain Sebelum Setelah	Sbe. PKM Setl. PKM	Omzet Setl. PKM	Pendapatan bersih	
JEMBER												
	Pingahan		37.000			21.640	31.700	2.307	2.457	4.245	5.789	1.900
26	Karta	Sud	2.000	Industri	36	300	450	0	0	900	1.200	75
27		Bas	2.000	Dagang	36	500	700	100	200	500	700	75
28		Mas	2.000	Dagang	42	325	600	0	0	200	350	80
29		Jam	2.000	Dagang	36	400	500	50	10	400	550	40
30		Ahm	1.000	Industri	36	450	650	700	700	1.500	2.100	100
31	A.N.	Sug	1.300	Pertanian	42	500	625	0	0	2.500	3.000	90
32		Sur	2.500	Dagang	39	325	500	0	0	600	1.500	90
33		Sum	2.500	Dagang	48	200	250	0	0	300	750	100
34		Sak	2.500	Dagang	42	150	200	300	400	1.500	2.000	100
35		Suc	2.500	Dagang	42	250	400	250	350	1.000	2.500	100
36		Nur	2.500	Dagang	42	375	600	0	0	300	500	100
37		Jum	2.000	Dagang	42	125	200	150	150	300	500	50
38		Mah	2.000	Dagang	42	350	600	0	0	2.000	3.000	50
39		Suh	200	Dagang	60	250	370	0	0	300	500	50
40		Nih	2.500	Dagang	60	250	300	0	0	2.500	5.000	100
41	Bati	Kus	2.000	Dagang	23	150	300	50	75	300	500	100
42		Suk	2.000	Dagang	30	300	600	0	75	350	750	150
43		Kas	2.000	Dagang	54	1.220	3.000	0	0	750	1.250	150
44		Pon	2.500	Dagang	30	150	300	50	0	600	1.100	150
45		Jok	2.500	Industri	24	300	450	0	0	0	0	50
46		Tuk	2.500	Dagang	24	100	180	250	1.000	75	150	50
47		Unt	2.500	Dagang	23	180	350	15	50	600	1.000	50
48		Sut	2.500	Dagang	23	150	300	100	20	250	750	100
49		Tri	2.500	Dagang	23	125	300	50	100	300	350	100
50		Bua	2.500	Dagang	30	240	3.150	0	0	750	1.000	100
Jumlah			90.000			29.305	47.575	4.372	5.587	23.020	36.789	4.100

(Rp.000)

Lampiran 1

TABEL : 8.3 Data BPR dan Nasabah PKM

No.	BPR	Nasabah	Prt kredit	Sekt. Ekonomi	Sk. Bunga/ Tahun	Pendapatan rata-rata / bln.		Usaha Lain		Omzet		Pendapatan bersih
						Seb. PKM	Setl. PKM	Sebelum	Setelah	Sbe. PKM	Setl. PKM	
	B. Wangi		90.000			29.305	47.575	4.372	5.587	23.020	35.789	4.100
51	Lestari	Din	2.000	Dagang	54	3.000	4.000	0	0	3.000	4.000	150
52		Sub	2.000	Dagang	54	600	800	0	0	600	800	200
53		Sul	2.000	Dagang	54	300	600	500	500	1.000	3.000	150
54		Kas	2.000	Dagang	42	600	900	0	0	1.000	1.500	200
55		Suj	2.000	Dagang	42	300	600	400	500	500	1.500	200
56		Suh	2.000	Dagang	42	300	600	125	125	1.000	1.800	200
57		Sho	2.500	Dagang	42	250	450	150	200	600	800	450
58		Sum	2.500	Dagang	54	600	1.000	0	0	2.000	3.000	100
59		Teg	2.500	Dagang	42	200	300	0	0	150	200	300
60		Mud	2.000	Dagang	42	300	450	0	0	200	250	300
61	Genta	Ahm	2.000	Pertanian	54	360	750	0	0	800	1.800	100
62		Pat	2.000	Dagang	42	300	600	0	0	1.250	2.000	200
63		Sit	2.000	Pertanian	60	0	0	0	0	0	0	100
64		Ale	2.000	Dagang	54	300	350	1.000	1.000	1.000	1.800	350
65		Kho	2.000	Dagang	54	20	35	600	1.050	4.000	6.000	100
66		Pat	2.000	Dagang	60	150	360	0	0	600	1.100	360
67		Nga	2.500	Dagang	60	375	750	375	375	1.000	2.000	200
68		Gim	2.500	Dagang	60	375	450	1.325	0	1.250	1.750	450
69		Riy	2.500	Dagang	60	600	1.350	0	0	1.500	2.500	100
70		Ping	2.500	Dagang	60	300	900	0	0	300	900	200
71	Joglo	Ima	2.500	Dagang	54	450	600	0	0	10	15	250
72		Kuk	2.500	Industri	54	150	225	0	0	775	1.125	225
73		Gad	2.000	Dagang	54	450	750	0	0	450	750	150
74		Mus	2.000	Pertanian	54	340	465	180	180	0	0	200
75		Abi	2.000	Dagang	54	480	582	0	0	80	100	200
JUMLAH						40.405	65.442	9.027	9.517	46.085	75.479	9.535

(Rp.000)

Lampiran 1

TABEL : 8.4 Data BPR dan Nasabah PKM

No.	BPR	Nasabah	Pif kredit	Sekt.Ekonomi	Sk.Bunggal Tahun	Pendapatan rata-rata 1 bin		Usaha Lain		Omzet		Pendapatan bersih
						Seb.PKM	Setelah	Sebelum	Setelah	Sbe.PKM	Seti.PKM	
	B.WANGI		144.500			46.405	65.442	9.027	9.517	46.085	75.479	9.535
76	Pindahan											
76	Joglo	Ima	2.000	Dagang	54	300	650	0	0	280	750	100
77		Sya	2.000	Dagang	54	360	450	0	0	80	180	200
78		Suw	2.000	Dagang	54	250	315	350	375	2.000	2.800	200
79		Har	2.000	Dagang	54	300	390	0	0	200	300	150
80		Suk	2.000	Dagang	54	82	129	0	0	410	645	150
	S.BONDO											
81	Aya	Dar	1.750	Dagang	36	150	150	0	0	100	200	100
82		Hoi	1.750	Dagang	36	175	175	0	0	100	125	150
83		Tau	2.500	Dagang	36	94	156	0	0	1.875	3.125	175
84		Sut	2.500	Pertanian	42	400	600	750	750	4.000	4.000	150
85		Juh	2.500	Pertanian	36	106	106	125	125	0	0	150
86		Har	2.500	Dagang	36	400	550	450	450	400	550	100
87		Suk	2.500	Dagang	54	150	250	252	252	1.500	2.500	200
88		San	2.500	Dagang	54	200	400	125	125	2.000	4.000	150
89		Aki	2.500	Dagang	54	250	325	531	531	750	900	150
90		Jok	2.000	Dagang	54	1.325	1.600	700	750	750	900	150
	B.WOSO											
91	Basuki	Har	2.500	Dagang	36	325	475	0	0	80	100	300
92		Sur	2.500	Dagang	36	100	240	290	255	100	200	240
93		Ali	2.500	Pertanian	54	300	375	10	12	0	0	375
94		Sat	2.500	Pertanian	54	120	375	120	150	280	375	375
95		Mis	2.500	Dagang	54	500	1.100	0	0	500	1.100	100
96		Jal	2.500	Pert./Dag.	54	300	340	450	240	750	580	150
97		Tir	2.500	Pertanian	48	450	450	0	0	0	0	450
98		Adi	2.500	Pertanian	48	2.100	2.100	0	0	0	0	100
99		Mis	2.500	Pert./Dag.	54	300	450	0	0	2.000	3.500	450
100		Ism	2.500	Dagang	54	0	400	0	600	1.250	2.000	400
JUMLAH						49.442	77.993	13.190	14.132	86.490	104.309	14.160
X = Pendapatan rata ² per nasabah						494	780	132	141	655	1.043	148

(Rp.000)

Lampiran : 2

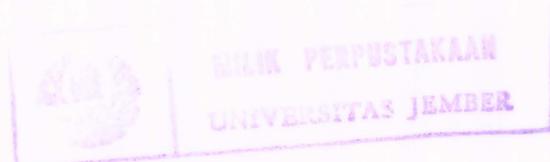
Tabel : 9.1 Data Perhitungan Uji Statistik

No.	Nasabah	PENDAPATAN		PERBEDAAN	d ²
		Sebelum PKM (X ₁)	Setelah PKM (X ₂)	d = X ₂ -X ₁	
1	Suk	500	750	250	62.500
2	Ruk	150	600	450	202.500
3	Pil	1.200	1.500	300	90.000
4	Sab	3.000	4.500	1.500	2.250.000
5	Har	350	1.500	1.150	1.322.500
6	Jas	800	1.000	200	40.000
7	Nur	1.800	3.750	1.950	3.802.500
8	Sit	7.800	9.750	1.950	3.802.500
9	Kas	500	500	0	0
10	Mul	550	600	50	2.500
11	Sur	210	300	90	8.100
12	Ahm	450	600	150	22.500
13	Muh	300	450	150	22.500
14	Sut	270	390	120	14.400
15	Mad	600	900	300	90.000
16	Suy	390	600	210	44.100
17	Sul	510	750	240	57.600
18	Mak	270	450	180	32.400
19	Sua	310	450	140	22.500
20	Mus	240	360	120	14.400
21	Tit	400	450	50	2.500
22	San	300	450	150	22.500
23	Mus	300	400	100	10.000
24	Sup	150	300	150	22.500
25	Sul	300	400	100	10.000
Jumlah		21.650	31.700	10.050	11.971.000

Lampiran : 2

Tabel: 9. 2 Data Perhitungan Uji Statistik

No.	Nasabah	PENDAPATAN		PERBEDAAN $d = X_2 - X_1$	d^2
		Sebelum PKM (X_1)	Setelah PKM (X_2)		
	Pemindahan ...	21.650	31.700	10.050	11.971.000
26	Sud	300	450	150	22.500
27	Bas	500	700	200	40.000
28	Mas	375	600	225	50.625
29	Jam	400	500	100	10.000
30	Ahm	450	650	200	40.000
31	Sug	500	625	125	15.625
32	Sur	325	500	175	30.625
33	Sum	200	250	50	2.500
34	Sak	150	200	50	2.500
35	Suc	250	400	150	22.500
36	Nur	375	600	225	50.625
37	Jum	125	200	75	5.625
38	Mah	350	600	250	62.500
39	Suh	250	370	120	14.400
40	Nih	200	300	100	10.000
41	Kus	150	300	150	22.500
42	Suk	300	600	300	90.000
43	Kas	1.210	3.000	1.790	3.204.100
44	Pon	150	300	150	22.500
45	Jok	300	450	150	22.500
46	Tuk	100	180	90	6.400
47	Unt	180	350	170	28.900
48	Sut	150	300	150	22.500
49	Tri	125	300	175	30.625
50	Bua	240	3.150	2.910	8.468.100
	Jumlah	29.305	47.575	18.280	24.269.150



Lampiran : 2

Tabel : 9.3 Data Perhitungan Uji Statistik

No.	Nasabah	PENDAPATAN		PERBEDAAN $d = X_2 - X_1$	d^2
		Sebelum PKM (X_1)	Setelah PKM (X_2)		
	Pemindahan ...	29.305	47.575	18.280	24.269.150
51	Din	3.000	4.000	1.000	1.000.000
52	Sub	600	800	200	40.000
53	Sul	300	600	300	90.000
54	Kas	600	900	300	90.000
55	Suj	300	600	300	90.000
56	Suh	300	600	300	90.000
57	Sho	250	450	200	40.000
58	Sum	600	1.000	400	160.000
59	Teg	200	300	100	10.000
60	Mud	300	450	150	22.500
61	Ahm	360	750	390	152.100
62	Pat	300	600	300	90.000
63	Sit	0	0	0	0
64	Ale	300	350	50	2.500
65	Kho	20	35	15	225
66	Pat	150	360	210	44.100
67	Nga	375	750	375	140.625
68	Gim	375	450	75	5.625
69	Riy	600	1.350	750	562.500
70	Ping	300	900	600	360.000
71	Ima	450	600	150	22.500
72	Kuk	150	225	75	5.625
73	Gad	450	750	300	90.000
74	Mus	340	465	125	15.625
75	Abi	480	582	102	10.404
	Jumlah	40.405	65.442	25.407	27.403.479

Lampiran : 2

Tabel : 9.4 Data Perhitungan Uji Statistik

No.	Nasabah	PENDAPATAN		PERBEDAAN $d = X_2 - X_1$	d^2
		Sebelum PKM (X_1)	Setelah PKM (X_2)		
	Pemindahan ...	40.405	65.442	25.407	27.403.479
76	Ima	300	650	350	122.500
77	Sya	360	450	90	8.100
78	Suw	250	315	65	4.225
79	Har	300	390	90	8.100
80	Suk	82	129	47	2.209
81	Dar	150	150	0	0
82	Hol	175	175	0	0
83	Tau	94	156	62	3.844
84	Sut	400	600	200	40.000
85	Juh	106	106	0	0
86	Har	400	550	150	22.500
87	Suk	150	250	100	10.000
88	San	200	400	200	40.000
89	Aki	250	325	75	5.625
90	Jok	1.325	1.600	275	75.625
91	Har	325	475	150	22.500
92	Sur	100	240	140	19.600
93	Ali	300	375	75	5.625
94	Sat	120	375	255	65.025
95	Mis	500	1.100	600	360.000
96	Jal	300	340	40	1.600
97	Tir	450	450	0	0
98	Adi	2.100	2.100	0	0
99	Mis	300	450	150	22.500
100	Isn	0	400	400	160.000
	Jumlah	49.442	77.993	28.921	28.403.057
	$\bar{X} = \text{Pendpt.rata}^2$	494,42	779,93	289,21	284.030,57

Lampiran : 3

Tabel 10:1 Data Perhitungan Korelasi Plafond Kredit dan Pendapatan

(Rp.000)

No.	Plafon kredit X	Pendapatan Y	X ²	Y ²	XY
1	2.000	100	4.000.000	10.000	200.000
2	2.000	50	4.000.000	2.500	100.000
3	1.250	50	1.562.500	2.500	62.500
4	1.000	50	1.000.000	2.500	50.000
5	1.000	50	1.000.000	2.500	50.000
6	1.250	50	1.562.500	2.500	62.500
7	1.500	50	2.250.000	2.500	75.000
8	1.000	75	1.000.000	5.625	75.000
9	1.000	75	1.000.000	5.625	75.000
10	1.250	50	1.562.500	2.500	62.500
11	1.250	50	1.562.500	2.500	62.500
12	1.250	50	1.562.500	2.500	62.500
13	1.250	50	1.562.500	2.500	62.500
14	1.500	75	2.250.000	5.625	112.500
15	1.000	75	1.000.000	5.625	75.000
16	1.500	50	2.250.000	2.500	75.000
17	1.500	150	2.250.000	22.500	225.000
18	2.000	100	4.000.000	10.000	200.000
19	2.000	100	4.000.000	10.000	200.000
20	2.000	50	4.000.000	2.500	100.000
21	2.000	100	4.000.000	10.000	200.000
22	2.000	100	4.000.000	10.000	200.000
23	1.500	150	2.250.000	22.500	225.000
24	1.500	100	2.250.000	10.000	150.000
25	1.500	100	2.250.000	10.000	150.000
Juml	37.000	1.900	58.125.000	167.500	2.912.500

Lampiran : 3

Tabel 10:2 Data Perhitungan Korelasi Plafond Kredit dan Pendapatan

(Rp.000)

No	Plafon kredit X	Pendapatan Y	X ²	Y ²	XY
Pind	37.000	1.900	58.125.000	167.500	2.912.500
26	2.000	75	4.000.000	5.625	150.000
27	2.000	75	4.000.000	5.625	150.000
28	2.000	80	4.000.000	6.400	160.000
29	2.000	40	4.000.000	1.600	80.000
30	1.000	100	1.000.000	10.000	100.000
31	1.300	90	1.690.000	8.100	117.000
32	2.500	90	6.250.000	8.100	225.000
33	2.500	100	6.250.000	10.000	250.000
34	2.500	100	6.250.000	10.000	250.000
35	2.500	100	6.250.000	10.000	250.000
36	2.500	100	6.250.000	10.000	250.000
37	2.000	50	4.000.000	2.500	100.000
38	2.000	50	4.000.000	2.500	100.000
39	200	50	40.000	2.500	10.000
40	2.500	100	6.250.000	10.000	250.000
41	2.000	100	4.000.000	10.000	200.000
42	2.000	150	4.000.000	22.500	300.000
43	2.000	150	4.000.000	22.500	300.000
44	2.500	150	6.250.000	22.500	375.000
45	2.500	50	6.250.000	2.500	125.000
46	2.500	50	6.250.000	2.500	125.000
47	2.500	50	6.250.000	2.500	125.000
48	2.500	100	6.250.000	10.000	250.000
49	2.500	100	6.250.000	10.000	250.000
50	2.500	100	6.250.000	10.000	250.000
Juml	90.000	4.100	178.105.000	385.450	7.654.500

Lampiran : 3

Tabel 10:3 Data Perhitungan Korelasi Plafond Kredit dan Pendapatan

(Rp.000)

No.	Plafon kredit X	Pendapatan Y	X ²	Y ²	XY
Pind	90.000	4.100	178.105.000	385.450	7.654.500
51	2.000	150	4.000.000	22.500	300.000
52	2.000	200	4.000.000	40.000	400.000
53	2.000	150	4.000.000	22.500	300.000
54	2.000	200	4.000.000	40.000	400.000
55	2.000	200	4.000.000	40.000	400.000
56	2.000	200	4.000.000	40.000	400.000
57	2.500	450	6.250.000	202.500	1.125.000
58	2.500	100	6.250.000	10.000	250.000
59	2.500	300	6.250.000	90.000	750.000
60	2.000	300	4.000.000	90.000	600.000
61	2.000	100	4.000.000	10.000	200.000
62	2.000	200	4.000.000	40.000	400.000
63	2.000	100	4.000.000	10.000	200.000
64	2.000	350	4.000.000	122.500	700.000
65	2.000	100	4.000.000	10.000	200.000
66	2.000	360	4.000.000	129.600	720.000
67	2.500	200	6.250.000	40.000	500.000
68	2.500	450	6.250.000	202.500	1.125.000
69	2.500	100	6.250.000	10.000	250.000
70	2.500	200	6.250.000	40.000	500.000
71	2.500	250	6.250.000	62.500	625.000
72	2.500	225	6.250.000	50.625	562.500
73	2.000	150	4.000.000	22.500	300.000
74	2.000	200	4.000.000	40.000	400.000
75	2.000	200	4.000.000	40.000	400.000
Juml	144.500	9.535	298.355.000	1.813.175	19.662.000

Lampiran : 3

Tabel 10:3 Data Perhitungan Korelasi Plafond Kredit dan Pendapatan

(Rp.000)

No.	Plafon kredit X	Pendapatan Y	X ²	Y ²	XY
Pind	90.000	4.100	178.105.000	385.450	7.654.500
51	2.000	150	4.000.000	22.500	300.000
52	2.000	200	4.000.000	40.000	400.000
53	2.000	150	4.000.000	22.500	300.000
54	2.000	200	4.000.000	40.000	400.000
55	2.000	200	4.000.000	40.000	400.000
56	2.000	200	4.000.000	40.000	400.000
57	2.500	450	6.250.000	202.500	1.125.000
58	2.500	100	6.250.000	10.000	250.000
59	2.500	300	6.250.000	90.000	750.000
60	2.000	300	4.000.000	90.000	600.000
61	2.000	100	4.000.000	10.000	200.000
62	2.000	200	4.000.000	40.000	400.000
63	2.000	100	4.000.000	10.000	200.000
64	2.000	350	4.000.000	122.500	700.000
65	2.000	100	4.000.000	10.000	200.000
66	2.000	360	4.000.000	129.600	720.000
67	2.500	200	6.250.000	40.000	500.000
68	2.500	450	6.250.000	202.500	1.125.000
69	2.500	100	6.250.000	10.000	250.000
70	2.500	200	6.250.000	40.000	500.000
71	2.500	250	6.250.000	62.500	625.000
72	2.500	225	6.250.000	50.625	562.500
73	2.000	150	4.000.000	22.500	300.000
74	2.000	200	4.000.000	40.000	400.000
75	2.000	200	4.000.000	40.000	400.000
Juml	144.500	9.535	298.355.000	1.813.175	19.662.000

PROYEK KREDIT MIKRO

KBI JEMBER

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK EVALUASI PKM

BPR.....

- | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|---------------------|
| 1. Nama nasabah | : | | | Laki-laki/Perempuan |
| 2. Alamat | : | | | |
| 3. Plafon kredit | : | | | |
| 4. Sektor ekonomi | : | | | |
| 5. Baki debet | : | | | |
| 6. Tgl. Pencairan kredit | : | | | |
| 7. Suku bunga kredit | : | | | |
| 8. Perkembangan usaha | : | | | Dalam ribuan rupiah |

SEBELUM MEMPEROLEH KREDIT		SETELAH MEMPEROLEH KREDIT	
OMZET USAHA (Bukan sektor pertanian)	Rp		Rp
Pendapatan rata2 1 hari	Rp		Rp
Pendapatan rata2 1 bln.	Rp		Rp
a. Dari Usaha Mikro	Rp		Rp
b. Dari Usaha lain	Rp		Rp
Pengeluaran konsumsi rata-rata 1 bulan	Rp		Rp
Tabungan(kalau ada)	Rp		Rp

PERKEMBANGAN PENDAPATAN SEBELUM DAN SETELAH MEMPEROLEH PKM

SEBELUM MEMPEROLEH KREDIT						SETELAH MEMPEROLEH KREDIT					
Bulan ke *)	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	
Usaha Mikro											
Usaha lainnya											

*) Pendapatan rata-rata per bulan sebelum memperoleh kredit diisi kalau data ada, kalau data sudah tidak ada bisa diisi kira-kira saja.

Manfaat lain yang dirasakan setelah mendapat kredit mikro

.....

RINCIAN BIAYA DAN PENDAPATAN USAHA(Diisi sesuai sektor usahanya)

1. BIDANG PERTANIAN TANAMAN PANGAN/PERKEBUNAN

- a. Luas tanah (milik sendiri/menyewa) (m²)
- b. Jenis tanaman
- c. Jumlah hasil panen (kg/kw/ton)
- Nilai Rp.
- d. Biaya produksi(Dlm ribuan Rp)
 - Tanah Rp.....
 - Bibit Rp.....
 - Pupuk Rp.....
 - Pestisida Rp.....
 - Tenaga Kerja Rp.....
 - (Diluar anggota RT)
- e. Penghasilan dari tanaman pangan Rp.....(bln/musim/thn)
- Pendapatan dari Perikanan Rp.....(bln/musim/thn)
- Pendapatan dari Peternakan Rp.....(bln/musim/thn)

2. PERDAGANGAN/INDUSTRI/JASA

- a. Hasil penjualan Rp.....(hr/mg/bln)
- b. Biaya produksi
 - Bahan baku Rp.....(hr/mg/bln)
 - Transportasi Rp.....(hr/mg/bln)
 - Tenaga kerja Rp (hr/mg/bln)
 - (Diluar anggota RT)
- Penghasilan bersih Rp(a - b)

3. BURUH TANI/KASAR

- a. penghasilan upah/hari Rp
- b. Pengeluaran Rp
- c. Pendapatan bersih Rp

LATAR BELAKANG USAHA DAN INDIKASI KESEJAHTERAAN

1. Apakah usaha mikro yang Bapak/Ibu kelola ini merupakan usaha :
 pokok -1 sampingan -2 (pilih yang sesuai)
2. Apakah ada rencana untuk melakukan kegiatan usaha lain?
 Ya -1 sebutkan.....
 Tidak -2
3. Pertimbangan apa yang Bapak/Ibu pergunakan memilih kegiatan usaha?
 Pengalamam - 1
 Keahlian - 2
 Potensi alam - 3
 Lainnya - 4 Sebutkan.....
4. Status pemilikan tempat tinggal
 Milik sendiri - 1
 Sewa - 2
 Lainnya - 3
5. Bangunan tempat tinggal
 - a. Dinding rumah terbuat dari
 - Tembok - 1
 - Kayu/balok - 2
 - Bambu - 3
 - Lainya - 4
 - b. Atap rumah terbuat dari :genteng tanah -1 seng -2 Sirap -3 lainnya-4
 - c. Lantai rumah terbuat dari tegal -1 semen -2 kayu -3 lainnya - 4
 - d. Luas lantaim²
6. Sumber penerangan utama yang digunakan : listrik-1, Petromak-2, Lampu minyak-3, Lainnya-4
7. Barang-barang yang telah dimiliki :
 - a. Radio
 - b. Televisi
 - c. Sepeda
 - d. Sepeda motor
 - e. Lain-lain(Sebutkan)
8. Rencana pembelian apabila ada tambahan penghasilan dari usaha akan dimanfaatkan untuk keperluan apa, sebutkan.....(misalnya biaya pendidikan, mengembangkan usaha dll.)
9. Penggunaan kredit mikro yang Bapak peroleh dipergunakan untuk apa ?
 - a. Untuk membiayai usaha Rp
 - b. Untuk perbaikan rumah/MCK Rp
 - c. Untuk biaya pengobatan Rp
 - d. Untuk beli keperluan/perabot RT Rp
 - e. Untuk biaya sekolah Rp
 - f. Untuk hajatan Rp

- g. Untuk membayar hutang Rp
- h. Lainnya Rp
10. Pengajuan kredit memerlukan waktu berapa lama ?.....hari/minggu/bulan
11. Dalam memperoleh kredit apakah Bapak/Ibu mengajukan permohonan kepada BPR atau BPR menawarkan kepada Bapak/Ibu ?
- a. Mengajukan permohonan ke BPR -1
- b. BPR mendatangi rumah Bapak/Ibu -2
12. Pada pinjaman tersebut apakah memerlukan agunan?
- Ya -1 Tidak -2 Kalau Ya, Sebutkan.....
13. Untuk pinjaman Bapak/Ibu yang tersebut, berapa kali sudah diangsur.....?
14. Cara mengangsur apakah Bapak/Ibu ke BPR atau BPR datang ke rumah Bapak/Ibu ?
- a. Bapak/Ibu datang ke BPR - 1
- b. Petugas BPR datang ke rumah Bapak/Ibu -2
15. Apakah Bapak/Ibu selalu mengangsur kredit tepat waktu?
- a. Selalu tepat waktu -1
- b. Kadang-kadang terlambat -2
16. Kalau pada waktu mengangsur belum ada uang bagaimana usaha Bapak/Ibu?
- a. Menunggu sampai barang/usahanya berhasil -1
- b. Menjual barang-barang rumah tangga -2
- c. Usaha lainnya -3
- Sebutkan kalau lainnya.....
17. Apakah Bapak/Ibu merasa senang bisa dipinjam kredit oleh BPR?
- a. Merasa senang karena sangat membantu permodalan - 1
- b. Biasa-biasa saja - 2
- c. Kadang merasa malu kalau didatangi petugas bank - 3
18. Apakah Bpk/Ibu pernah meminjam di bank lain (Bank Umum)?
- a. Belum pernah -1
- b. Pernah -2
19. Kalau pernah, bagaimana persyaratannya?
- a. Lebih banyak -1
- b. Lebih sedikit -2
- c. Sama saja -3
20. Kalau meminjam di bank lain(Bank Umum) pernah dilakukan, berapa lamanya kredit sampai bisa dicairkan?.....hari/minggu/bulan